

**RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA OPD)
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021. Renja OPD merupakan suatu metode perencanaan pembangunan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, agar dapat menentukan prioritas pembangunan kesehatan.

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami menyadari dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Semoga Allah Swt selalu melimpahkan petunjuk dan kekuatan bagi kita sekalian dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga, dalam upaya kita bersama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Amien.

Purbalingga, April 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURBALINGGA



dr. JUSI FEBRIANTO, MPH

Pembina

NIP. 19700219 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	6
II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD	5
A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	5
B. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	20
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas	26
D. Review Rancangan Awal RKPD.....	27
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	
III. TUJUAN DAN SASARAN PD	28
A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	28
B. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	28
C. Program Dan Kegiatan	30

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD	33
V. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan Nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal.

Tujuan Pembangunan Kesehatan sebagai salah satu upaya dalam pemenuhan hak dasar rakyat, yaitu mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Hal ini mengingat bahwa pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang dalam kaitannya untuk mendukung kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi yang kompetitif, serta peningkatan kesejahteraan sosial, yang pada akhirnya dapat sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Arah pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga secara umum adalah terselenggaranya program pembangunan kesehatan yang mendukung tercapainya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia* “**. Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efektif, inovatif, bersih, akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan

paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan pedesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / infrastruktur dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya seluruh misi kabupaten utamanya misi keempat yaitu *“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Utamanya melalui Peningkatan Derajat Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat”* maka Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan paripurna.

Profesional dimaknai sebagai pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang sistematis, transparan dan akuntabel dari para pelaku di jajaran Dinas Kesehatan. Kesehatan Paripurna dimaknai sebagai isu kesehatan yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperankan oleh semua pelaku kesehatan baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dunia usaha dan atau lembaga non pemerintah serta masyarakat secara profesional dan bertanggungjawab termasuk penyediaan sumber daya kesehatan

B. Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
4. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
5. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1118);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpenting, Sangat Terpenting, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 906);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
22. Perda Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga 2011-2031;

23. Perda Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
25. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Tujuan penyusunan Renja PD adalah agar dokumen perencanaan yang disusun dapat dijadikan acuan pembangunan oleh berbagai pihak agar dalam melaksanakan kegiatan tercapai sinergitas antar dokumen perencanaan.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja PD Tahun 2021 adalah :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

D. Review Rancangan awal RKPD

E. Usulan Program / Kegiatan Masyarakat

BAB III.TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021

Kabupaten Purbalingga

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				89.356.157.500		87.346.794.080	#DIV/0!	97,75
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase sub kegiatan dalam dokumen perencanaan yang dilaksanakan dan Prosentase rekomendasi evaluasi yang ditindaklanjuti	%	100	10.000.000	100	9.781.000	100	97,81
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja	dok	2	5.000.000	2	4.781.000	100	95,62
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPI, LKjIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan	dok	2	5.000.000	2	5.000.000	100	100,00

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	lembar kerja database SIPD) yang tersusun							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan penunjang operasional kantor	bln	12	88.508.178.500	12	86.590.136.731	100	97,83
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	ASN	1306	88.259.018.500	1.306	86.363.590.591	100	97,85
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD Dalam Daerah (≥ 8 jam) Tersedianya jamuan tamu dan rapat	%	100	35.160.000	93	32.655.000	93	92,88
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya Honor Pengelola Keuangan, Pemeriksa hasil pekerjaan, Pejabat Pengadaan, Honor Operator Komputer	%	100	209.000.000	91	189.514.140	91	90,68
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya LRA/LK/SPM	%	100	5.000.000	100	4.377.000	100	87,54
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Adminsitrasi umum perangkat daerah	%	100	312.970.000	100	278.012.350	100	88,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	%	100	4.911.000	100	4.874.000	100	99,25
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan rumah tangga	%	100	240.490.000	100	213.862.850	100	88,93
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya bahan logistik kantor	%	100	21.577.500	100	16.180.750	100	74,99
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan	%	100	2.100.000	100	2.100.000	100	100,00
Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Surat Kabar/Majalah	%	100	23.109.000	100	21.224.750	100	91,85
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Alat Tulis Kantor	%	100	3.282.500	100	2.405.000	100	73,27
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan tamu dan rapat	%	100	17.500.000	100	17.365.000	100	99,23

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	145.625.000	100	139.408.000	100	95,73
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	%	100	72.725.000	100	66.848.000	100	91,92
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	%	100	72.900.000	100	72.560.000	100	99,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	237.724.000	100	209.395.799	100	88,08
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko, materai, dan jasa pos/pengiriman	%	100	2.500.000	61	1.521.500	61	60,86
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya daya listrik, air PAM, Jasa telekomunikasi	%	100	180.450.000	100	153.894.301	100	85,28
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	16.134.000	100	15.339.998	100	95,08
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Honor Petugas Kebersihan, Penjaga Malam	%	100	38.640.000	100	38.640.000	100	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	%	100	141.660.000	100	120.060.200	100	84,75
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas (ganti oli, ganti suku cadang, dll)(12 unit R4 dan 70 unit R2)	%	100	66.400.000	100	51.432.500	100	77,46
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan Kerja	%	100	54.500.000	100	47.899.700	100	87,89
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor (pengecatan,dll)	%	100	20.760.000	100	20.728.000	100	99,85
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				77.740.025.430		68.334.691.994		87,90
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota				19.252.524.500		14.221.337.491		73,87

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas	Puskesmas	22	5.020.000.000	22	4.267.780.000	100	85,02
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas rawat jalan	Puskesmas	12	1.493.813.000	11	1.171.360.000	91,67	78,41
	Jumlah Puskesmas rawat inap	Puskesmas	11		11		100,00	#DIV/0!
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah total tempat tidur Puskesmas Rawat inap	TT	90	2.881.436.040	110	1.275.155.000	122,22	44,25
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas mampu bersalin	Puskesmas	23	1.766.816.960	16	1.614.853.860	69,57	91,40
	Jumlah Puskesmas Poned	Puskesmas	12		5		41,66667	#DIV/0!
	Jumlah RS Ponek	rs	4		1		25	#DIV/0!
Pengadaan Obat, Vaksin	Cakupan sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	3.839.965.500	100	2.245.630.567	100	58,48
	Proporsi ketersediaan obat generik dan esensial sesuai dengan standar dan kebutuhan	%	90		90		100	
Pengadaan Bahan Habis Pakai	Cakupan ketersediaan BMHP sesuai standar	%	100	4.178.493.000	100	3.577.588.064	100	85,62
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase alat kesehatan terkalibrasi	%	100	72.000.000	100	68.970.000	100	95,79
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Kesehatan Keluarga	%	95,67	58.348.987.930		53.992.614.451	0	92,53
	Cakupan Pelayanan Gizi Masyarakat	%	99,8				0	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	100	82.322.000	65	39.280.000	64,84	47,72
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	100	3.340.105.000	72	2.364.737.414	72,43	70,80

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	Cakupan pelayanan Nifas	%	100		67,13		67,13	
	Cakupan Peserta KB Aktif	%	80		79,3		99,125	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100	39.375.000	71	25.719.000	71,48	65,32
	Cakupan KN Lengkap	%	100		71,1581		71,16	
	Cakupan Neonatal Komplikasi ditangani	%	84		100		119,05	
	Cakupan ASI Eksklusif	%	75		63,2		84,27	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	26.538.000	63	25.680.000	62,72	96,77
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan pelayanan kesehatan Usia Pendidikan Dasar sesuai standar	%	100	162.081.000	21	118.711.100	20,80	73,24
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	50.037.500	15	29.050.300	15,03	58,06
	Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan PTM (Posbindu)	Desa	238		238		100	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	%	100	12.370.200	47	11.020.000	47,3	89,09
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	%	100	83.742.000	6	69.885.900	5,9	83,45
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	%	100	91.996.800	68	34.466.000	68,5	37,46
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	%	100	9.300.000	77	6.462.500	76,6	69,49
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar		100	353.999.200	45	292.863.152	44,8	82,73
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Sesuai Standar		100	330.455.800	67	323.133.723	66,8	97,78

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam	%	100	34.520.898.000	100	33.699.369.709	100,0	97,62
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Prevalensi balita gizi kurang	%	2,7	1.414.712.850	3	819.993.172	123,0	57,96
	Prevalensi bayi dengan BBLR	%	0,05		6		12000	
	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beriodium baik	%	100		0		0	
	Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beriodium	%	99		100		101,01	
	Cakupan Balita Gibur yang mendapat perawatan	%	100		100		100,00	
	Persentase bumil KEK	%	7		0,78		11,14	
	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah	%	100		67		67,00	
	Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah	%	70		0		0,00	
	Persentase bayi lahir yang diberi IMD	%	90		86,46		96,07	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Pembinaan UKK (Upaya Kesehatan Kerja) dan Olah Raga	%	100	34.273.380		33.900.000	0	98,91
	Jumlah puskesmas yang telah menerapkan K3 internal puskesmas	Puskesmas	22		22		100	
	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Puskesmas	22		22		100	
	Jumlah pos UKK yang terbentuk	Pos	16		23		143,75	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Pembinaan dan Pengembangan Upaya Kesehatan Lingkungan	%	100	1.232.843.000		1.170.411.110	0	94,94
	Cakupan kepemilikan jamban keluarga	%	89,7		79,55		88,68	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	Cakupan akses jamban keluarga	%	91,6 1		82,63		90,20	
	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan	%	70		70,28		100,40	
	Desa Open Defecation Free (ODF)	Desa	239		51,43		21,52	
	Cakupan rumah sehat	%	76,5		61,15		79,93	
	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM	%	100		85,71		85,71	
	Proporsi Tempat Umum dan Pengelolaan Makanan (TUPM) yang memenuhi syarat	%	56,3		51,04		90,66	
	Proporsi penduduk Akses Air minum	%	86		96,91		112,69	
	Proporsi pembinaan pengelolaan sampah	%	85		45,63		53,68	
	Proporsi pembinaan pengelolaan sarana pembuangan air limbah rumah tangga	%	56		36,53		65,23	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	%	100	6.768.000		4.816.000	0	71,16
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)	%	238	134.565.125	238	122.301.000	100	90,89
	Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji	%	0		0		#DIV/0!	
	Persentase Jamah Haji Mendapat Pelayanan Kesehatan Haji	%	100		40		40	
	Pelayanan kesehatan PPPK	%	100		65		65	
	AFP Rate	0/00.000	2		1		50	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Cakupan penanganan ODMK	%	100	38.483.125		26.941.500	0	70,01

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa dan NAPZA	Puskesmas	22	65.029.350	22	54.348.000	100	83,57
Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Cakupana Pelayanan penyakit khusus	%	100	230.000.000	100	212.225.000	100	92,27
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Prevalensi malaria Indigenus	0 /.000	0	213.282.000	-	181.265.500		84,99
	Angka kesakitan malaria	0 /.000	0,04		0		40	
	Case Notification Rate (CNR) TB	0/0.000	15		17,80		118,64	
	Angka penemuan semua kasus TB	%	69		9,52		13,80	
	Jml Penemuan Kasus baru ODHA	org	75		9		12,00	
	Prevalensi HIV/AIDS (15-49 Thn)	%	0,5		0,008		1,60	
	Angka prevalensi kasus kusta	0/0.000	0,00 01		0,14		140000,0 0	
	Incident Rate (IR) DBD	0/00.000	20		1,8		9,00	
	Case Fatality Rate (CFR) DBD	%	1		5,56		556,00	
	Cakupan penemuan kasus Pneumonia pada Balita	%	48		11,17		23,27	
	Cakupan balita diare yang ditangani	%	100		100		100	
	Cakupan kasus filariasis ditangani	%	100		100		100	
	kasus Zoonosis yang diatangani	%	100		100		100	
	Persentase perempuan usia 30 sd 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	%	100		0,20		0,2	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Cakupan Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota PBI	%	94,7	14.165.112.000	-	13.947.301.939	0	98,46

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	Cakupan JKN bagi penduduk miskin	%	62,0 7		51,49		82,95	
	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan	%	62,0 7		78,91		127,13	
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Persentase RS yang memiliki ijin operasional	%	94,7	7.000.000	100	5.190.250	105,60	74,15
	Bed Occupancy Ratio (BOR)	%	20,1 6		11,59		57,49	
	Net Death Rate (NDR)	%	10,9		4,51		41,38	
	Gross Death Rate (GDR)	%	25,3 3		9,88		39,01	
	Length Of Stay (LOS)	%	30,4 4		44,63		146,62	
	Turn Over Interval (TOI)	%	20,9 2		26,98		128,97	
	Bed Turn Over (BTO)	%	56,0 5		64,71		115,45	
Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase puskesmas yg memiliki ijin operasional	%	100	81.727.600	100	26.856.800	100	32,86
	persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas dengan pendekatan keluarga	%	100		100		100	
	Persentase puskesmas yang melaksanakan perawatan kesehatan masyarakat	%	100		100		100	
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Pembinaan fasilitas kesehatan lainnya	%	100	257.000.000	100	256.157.600	100	99,67
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	100	1.355.239.000	100	82.287.782	100	6,07
	Persentase Rumah sakit Terakreditasi	%	100		100		100	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Cakupan investigasi KIPI		100	9.732.000	75	8.240.000	75	84,67
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Cakupan Penyelenggaraan Sistem Informasi Terintegrasi	%	100	107.017.000	100	97.971.002	100	91,55
Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah	%	100	24.700.000	100	18.715.000	100	75,77
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS) untuk pelaksanaan e-kesehatan	%	100	82.317.000	100	79.256.002	100	96,28
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	Cakupan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota	%	100	31.496.000	75	22.769.050	75	72,29
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Cakupan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	%	100	4.124.000	75	3.499.000	75	84,84
Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%	100	4.532.000	75	3.163.000	75	69,79
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	%	100	22.840.000	75	16.107.050	75	70,52
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				422.957.000		270.845.100		64,04
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota				5.000.000		4.713.100		94,26
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	%	100	2.500.000	92	2.494.700	91,7	99,79
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah SIP dokter yang terbit	Buah	200	2.500.000	179	2.218.400	89,5	88,74
	Jumlah SIPB yang terbit	Buah	426		105		24,64789	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	Jumlah SIK/SIP perawat yang terbit	Buah	352		190		53,97727	
	Jumlah SIPA yang terbit	Buah	122		152		124,5902	
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota				170.192.000		161.537.000		94,91
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	%	19,7 5	14.192.000	17	12.287.000	86,58228	86,58
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio dokter spesialis per 100.000 jumlah penduduk	0/00.000	13,8 6	156.000.000	10	149.250.000	72,87157	95,67
	Ratio dokter gigi terhadap per 100.000 penduduk	0/00.000	4		3,8		95	
	Ratio bidan terhadap penduduk	0/00.000	61,3 3		71,3		116,2563	
	Ratio perawat terhadap penduduk	0/00.000	172		124,5		72,38372	
	Ratio sanitarian terhadap penduduk	0/00.000	4		5		125	
	Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga (kesling, farmasi, gizi, kesmas, analis kesehatan)	Puskesmas	22		91		413,6364	
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				247.765.000		104.595.000		42,22
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan	%	100	247.765.000	100	104.595.000	100	42,22
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				199.291.000		82.441.500	#DIV/0!	41,37
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				20.449.000		5.755.350	#DIV/0!	28,14

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	%	100	20.449.000	50	5.755.350	50	28,14
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				97.745.000		54.143.050	#DIV/0!	55,39
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan	Sampel	100	97.745.000	50	54.143.050	50	55,39
	Proporsi pembinaan dan evaluasi makmin	%	100		50		50	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				81.097.000		22.543.100	#DIV/0!	27,80
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Cakupan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	%	100	81.097.000	50	22.543.100	50	27,80
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				714.147.000		535.250.700	#DIV/0!	74,95
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				359.788.000		288.998.700	#DIV/0!	80,32
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik	Kali	48	359.788.000	792	288.998.700	1650	80,32
	Jumlah penyuluhan melalui media cetak	Kali	12		826		6883,33	

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD (TAHUN 2021)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN		CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN	
	Indikator	Satuan	K	Rp.	K	Rp.	%	%
	Jumlah penyuluhan luar ruangan	Kali	92		1.627		1768,48	
Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				189.559.000		103.769.000	#DIV/0!	54,74
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Cakupan rumah tangga ber-PHBS	%	81	189.559.000	86,8	103.769.000	107,16	54,74
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				164.800.000		142.483.000	#DIV/0!	86,46
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Cakupan desa siaga aktif	%	100	164.800.000	78,24	142.483.000	78,24	86,46
	Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif mandiri	%	100		23,43		23,43	
	Cakupan Posyandu Mandiri	%	69,9 1		71,50		102,27	
	Jumlah ormas/ LSM yg bekerjasama dengan institusi kesehatan	Ormas/ LSM	6		8		133,33	

B. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2021
Kabupaten Purbalingga

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu		101	88	75	70	64	61	81,19	81,00	191,64	74,32	74,32
2	Angka Kematian Bayi		9,2	8,1	7,5	7,1	6,5	6,1	7,58	7,77	9,72	7,70	7,64
3	Angka Kematian Balita		11,87	10,7	9,5	8,4	8,1	7,2	9,1	9,25	11,64	9,19	9,12
4	Cakupan K4		97	97,3	97,8	97,9	98	99	100	95,67	94,64	99,00	100,00
5	Pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar		100	100	100	100	100	100	95,95	95,67	99,64	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
6	Pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	99,8	99,73	100,00	100,00
7	Cakupan persalinan Faskes		98	98,5	100	100	100	100	99,43	99,6	99,5	100,00	100,00
8	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar		100	100	100	100	100	100	99,88	99,9	97,02	100,00	100,00
9	Cakupan KN Lengkap		100	100	100	100	100	100	96,3	95,95	97,02	100,00	100,00
10	Cakupan Neonatal Komplikasi		100	100	100	100	100	84	100	100	62,74	100,00	100,00
11	Cakupan kunjungan Bayi		91	92	93	94	95	95	95,56	92,2	97	95,00	100,00
12	Cakupan ASI Eksklusif		62	65	68	70	73	75	68,4	68	72,33	75,00	80,00
13	Cakupan pelayanan Nifas		94	95	96	97	98	100	92,35	94	94,03	100,00	100,00
14	Cakupan pelayanan anak balita		90	92	94	96	98	100	94,4	81	85,5	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
15	Pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100	100	100	100	100	100	84,44	81	90.23	100,00	100,00
16	Pelayanan kesehatan pada anak pendidikan dasar sesuai standar		100	100	100	100	100	100	97,81	100	84,7	100,00	100,00
17	Cakupan Penjaringan siswa SD sedrajat		98	99	100	100	100	100	100	100	98	100,00	100,00
18	cakupan Penjaringan siswa SLTP sedrajat		100	100	100	100	100	100	96	100	94,1	100,00	100,00
19	Cakupan Penjaringan siswa SLTA sedrajat		100	100	100	100	100	100	85	100	97,7	100,00	100,00
20	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan remaja		4	5	6	7	8	9	22	22	22	22,00	22,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
21	Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar		100	100	100	100	100	100	12,43	31,47	38,21	100,00	100,00
22	Jumlah Puskesmas Santun Lansia		7	10	13	16	20	22	16	20	22	22,00	22,00
23	Pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar		100	100	100	100	100	100	61,03	60,14	70,29	100,00	100,00
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia		30	40	50	60	70	100	61,03	60,14	70,29	80,00	80,00
25	Cakupan Peserta KB Aktif		77	77,5	78	78,5	79	80	81	80.90	80	80,00	82,00
26	Cakupan sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar		60	62	65	70	75	100	85	95	100	95,00	95,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
27	Proporsi ketersediaan obat generik dan esesial sesuai dengan standar dan kebutuhan		80	90	100	100	100	90	100	94	100	100,00	100,00
28	Jumlah Puskesmas		22	22	24	25	25	22	23	23	22	22,00	23,00
29	Jumlah puskesmas rawat jalan		11	10	10	6	6	11	11	11	11	11,00	12,00
30	Jumlah Puskesmas rawat inap		11	12	14	19	19	11	11	11	11	11,00	11,00
31	Jumlah total tempat tidur Puskesmas Rawat inap		145	150	160	185	185	180	130	130	135	130,00	130,00
32	Jumlah Puskesmas mampu bersalin		13	14	15	16	17	23	16	17	17	17,00	19,00
33	Jumlah Puskesmas Poned		5	7	7	7	7	12	5	5	5	5,00	6,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
34	Jumlah RS Ponek		1	2	2	3	4	4	1	1	1	1,00	3,00
35	Prevalensi balita gizi buruk		0,11	0,1	0,095	0,09	0,085	0,08	0,08	0,12	0,14	0,1	0,1
36	Prevalensi balita gizi kurang		3	2,85	2,85	2,8	2,75	2,7	2,83	3,05	2,99	3,0	3,0
37	Prevalensi bayi dengan BBLR		5,20%	5,10%	5,08%	5,05%	5%	5%	5,51%	5,18%	5,8%	5,0	5,0
38	Persentase kecamatan bebas rawan gizi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
39	Persentase balita kurus mendapat PMT		80	85	90	95	96	96	100	100	100	100,00	100,00
40	Cakupan desa/kelurahan dengan konsumsi garam beryodium baik		100	100	100	100	100	100	94,7	98	98	99,00	99,00
41	Persentase rumah tangga mengkonsumsi garam beryodium		90	93	95	96	98	99	97,93	98,76	99,3	99,00	99,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
42	Cakupan Balita yang mendapat perawatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
43	Persentase bumil KEK		10,5	9	8,5	8	7,5	7	11,7	10,79	11,28	10,00	10,00
44	Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
45	Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah		100	100	100	100	100	100	89,1	91,49	96,58	98,00	98,00
46	Persentase remaja putri mendapat tablet tambah darah		20	30	40	50	60	70	100	95,27	97,63	96,00	96,00
47	Persentase bayi lahir yang diberi IMD		55	65	70	80	85	90	81,89	82,7	82	83,00	83,00
48	Cakupan desa siaga aktif		100	100	100	100	100	100	100	78,24	77,82	80,00	80,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
49	Cakupan rumah tangga ber-PHBS		75	76	77	78	79	86,8	81	86,28	89,2	89,00	89,00
50	Cakupan Posyandu Mandiri		60%	65%	70%	70%	70%	69,91%	69,67%	71,50%	77,02%	76,00	76,00
51	Proporsi desa/ kelurahan siaga aktif mandiri		13	15	17	19	20	100	100	23,23	25,10	25,5	25,5
52	Jumlah ormas/ LSM yg bekerjasama dengan institusi kesehatan		1	2	3	4	5	6	4	8	6	9,00	9,00
53	Proporsi Posyandu mandiri		60	65	67	70	75	75	69,67	72	67,4	76,00	76,00
54	Jumlah penyuluhan melalui media elektronik		48	48	48	48	48	48	524	3220	1.967	3250,00	3250,00
55	Jumlah penyuluhan melalui media cetak		6	12	12	12	12	12	1065	3460	2367	3500,00	3500,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
56	Jumlah penyuluhan luar ruangan		46	92	92	92	92	92	1274	5872	4.260	5900,00	5900,00
57	Cakupan kepemilikan jamban keluarga		75	77	80	82	85	89,7	76,4	78,62	85,02	87,00	87,00
58	Cakupan akses jamban keluarga		80	90	95	100	100	91,61	91,5	92,53	92,78	100,00	100,00
59	Cakupan sarana air minum yang dilakukan pengawasan		70	75	80	90	95	70	87	63,6	83,5	100,00	100,00
60	Desa Open Defecation Free (ODF)		40	65	105	150	195	239	149	153	169	239,00	239,00
61	Cakupan rumah sehat		70	75	80	82	85	76,5	76,55	76,5	85	85,00	85,00
62	Cakupan desa/kelurahan melakukan STBM		80	90	95	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
63	Proporsi Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat		60	65	70	75	80	56,3	45,04	54,8	49,7	85,00	85,00
64	Proporsi TTU memenuhi syarat		81	82	83	84	85	56,3	69,8	68,6	49,7	86,00	86,00
65	Proporsi penduduk Akses Air minum		79	81	82	83	84	86	90,4	92,05	93	85,00	85,00
66	Proporsi pembinaan pengelolaan sampah		51	52	53	54	55	85	53	53	93	56,00	56,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
67	Proporsi pembinaan pengelolaan sarana pembuangan air limbah rumah tangga		44	51	52	53	54	56	34,2	34,2	34,2	55,00	55,00
68	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja formal		91	92	93	94	96	100	100	96	100	100,00	100,00
69	Cakupan pelayanan kesehatan kerja pada pekerja informal		20	22	24	30	34	40	30	34		40,00	40,00
70	Jumlah puskesmas yang telah menerapkan K3 internal puskesmas		4	8	12	16	20	22	22	22	22	22,00	22,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
71	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kegiatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya		4	6	12	16	20	22	22	22	22	22,00	22,00
72	Jumlah pos UKK yang terbentuk		4	6	8	12	14	16	40	33	52	35,00	35,00
73	Cakupan Universal Child Immunization (UCI)		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
74	Proporsi kasus meningitis pada jemaah haji		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
75	Persentase Jemaah Haji Mendapat Pelayanan Kesehatan Haji		100	100	100	100	100	100	100	0	0	100,00	100,00
76	Pelayanan kesehatan PPPK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
77	Persentase Bencana dan Krisis Kesehatan yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
78	AFP Rate		2	2	2	2	2	2	5,19	2,60	5	2,50	2,50
79	Prevalensi malaria Indigenus		0,03	0,02	0,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
80	Angka Kesakitan Malaria		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,01	0,05	0,02	0,01	0,01
81	Case Notification Rate (CNR) TBC		128	134	130	147	154	15	148	104,48	98	105,00	105,00
82	Angka Penemuan kasus baru TB		65	67	69	71	73	63	76	54,66	51	60,00	60,00
83	Pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
84	Prevalensi HIV/AIDS Usia 15 - 49 tahun		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,5	0,03%	0,03%	0,01	0,00	0,00
85	Cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani		100%	100%	100%	100%	100%	48%	100%	100%	27,63	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
86	Angka penemuan kasus baru kusta		25	28	30	32	34	36	12	7	12	7,00	7,00
87	Incident Rate DBD		0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	20	0,58%	0,20%	9,59	0,20%	0,00
88	Case Fatality Rate (CFR) DBD		2%	2%	2%	2%	2%	1%	2%	1,10%	5,15%	2%	0,02
89	Cakupan balita diare yang ditangani		100	100	100	100	100	100	100	100	34,52	100,00	100,00
90	Persentase desa/kelurahan mengalami KLB yang ditangani < 24 jam		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
91	Jumlah penemuan kasus baru ODHA		98	98	98	98	98	75	89	109	62	100,00	100,00
92	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
93	Cakupan penemuan kasus diare pada balita		58	59	60	61	62	56	58	27	43,4	30,00	30,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
94	Cakupan penemuan kasus Pneumonia Pada Balita		43	44	45	46	47	48	68	23,35	19,5	40,00	40,00
95	Jumlah Kasus baru filariasis		0	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00
96	Cakupan kasus filariasis ditangani		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
97	Angka kasus zoonosis yg ditangani		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
98	Proporsi kenaikan penemuan kasus baru hipertensi di fasyankes		6,15	6,18	7	8	9	10	2	16,14		20,00	20,00
99	Proporsi kenaikan penemuan kasus baru DM di Fasyankes		0,5	1	1,5	1,7	2,5	3	0,43	6,46		7,00	7,00
100	Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
101	Pelayanan penderita hipertensi sesuai standar		100	100	100	100	100	100	14,52	11	10,69	11,00	11,00
102	Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus DM		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
103	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus sesuai standar		100	100	100	100	100	100	134,53	112,59	42,1	100,00	100,00
104	Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia < 18 tahun												
105	Jumlah pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
106	Jumlah desa / kelurahan yang melaksanakan PTM (Posbindu)		70	80	90	100	110	239	203	239	239	239,00	239,00
107	Persentase perempuan usia 30 sd 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara		10	20	30	40	50	55	1,4	1,78	0,2	2,00	2,00
108	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar		100	100	100	100	100	100	69,42	73,5	97,4	75,00	75,00
109	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan jiwa		22	22	24	25	25	22	22	22	22	22,00	22,00
110	Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi		100	100	100	100	100	100	100	75,6	97,1	78,00	78,00
111	Cakupan pelatihan tenaga kesehatan		100	100	100	100	100	100	98	100	100	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
112	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk		13,7	13,8	13,9	14	14,1	19,5	19,75	15,6	17,1	16,00	16,00
113	Rasio dokter spesialis per 100.000 jumlah penduduk		5	5,5	6	6,5	7	13,86	13,86	9,5	10,1	10,00	10,00
114	Ratio dokter gigi terhadap per 100.000 penduduk		2,91	2,5	2,75	3	3	4	4,6	3,9	3,8	4,00	4,00
115	Ratio bidan terhadap penduduk		60	65	70	75	80	61,33	61,33	60,6	71,3	61,00	61,00
116	Ratio perawat terhadap penduduk		83,66	83,66	83,66	83,66	83,66	172	155,12	106	124,5	106,00	106,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
117	Ratio sanitarian terhadap penduduk		3,22	3,25	3,7	3,8	3,9	4	5,34	5,6	5	5,60	5,60
118	Jumlah SIP dokter yang terbit		160	168	176	184	192	200	255	208	179	208,00	208,00
119	Jumlah SIPB yang terbit		266	292	321	353	388	426	110	181	105	181,00	181,00
120	Jumlah SIK/SIP perawat yang terbit		278	291	305	320	336	352	420	343	190	350,00	350,00
121	Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga (kesling, farmasi, gizi, kesmas, analis kesehatan)		70	100	100	100	100	100	100	95,5	1000	100,00	100,00
122	Jumlah SIPA yang terbit		88	92	107	112	117	122	68	36	152	50,00	50,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
123	Jumlah Penilaian Angka Kredit yang diselesaikan		150	200	250	300	350		316	1902		2000,00	2000,00
124	Cakupan Jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin non kuota PBI		100	100	100	100	100	94,7	100	100		100,00	100,00
125	Cakupan JKN bagi penduduk miskin		85	90	95	100	100	62,07	86,3	100	91,8	100,00	100,00
126	Cakupan penduduk yang menjadi peserta jaminan pemeliharaan kesehatan		80	85	90	100	100	62,07	86,3	85,61	84,6	86,00	86,00
127	Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK		100	100	100	100	100		100	100		100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
128	Proporsi pembinaan dan pengawasan distribusi bid dan farmasi dan perbekes		65	70	75	80	85	100	85	85	100	85,00	85,00
129	Jumlah pemeriksaan makanan dan minuman yang diperdagangkan		155	175	175	180	180	100	180	180	100	180,00	180,00
130	Proporsi pembinaan dan evaluasi makmin		60	70	80	85	85	100	85	85	100	85,00	85,00
131	Cakupan pemanfaatan SIM pada fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
132	Jumlah BLUD pada fasilitas kesehatan milik pemerintah		1	1	23	23	23	23	23	23	23	25,00	25,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
133	Jumlah pengunjung web site Dinkes Kabupaten (pengunjung)		500	1000	1500	2000	2500	3000	3000	3000	4000	5000,00	5000,00
134	Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS) untuk pelaksanaan e-kesehatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
135	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas		22	22	22	24	25	22	22	22	22	22,00	22,00
136	Jumlah dokumen informasi kesehatan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
137	Jumlah Puskesmas Terakreditasi		7	15	22	25	25	22	22	22	22	22,00	22,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
138	Jumlah Rumah sakit Terakreditasi		1	1	2	3	4	6	6	6	6	6,00	6,00
139	Jumlah puskesmas yg memiliki ijin operasional		22	22	22	24	25	22	22	22	22	22,00	22,00
140	Jumlah RS yang memiliki ijin operasional		5	6	6	6	6	6	6	6	8	8,00	8,00
141	Persentase puskesmas yang melaksanakan perawatan kesehatan masyarakat		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
142	Persentase puskesmas yang telah bekerjasama melalui dinas kesehatan dengan UTD dan RS		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
143	Persentase Kasus Kegawat Daruratan di Masyarakat yang		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
	ditangani												
144	a. Pelayanan kesehatan dasar		65	70	75	80	85						
145	— Bed Occupancy Ratio (BOR)		55	60	65	70	75		40	20,6			
146	— Net Death Rate (NDR)		0,7	0,6	0,5	0,5	0,5		6,1	11,6			
147	— Gross Death Rate (GDR)		0,5	0,5	0,5	0,4	0,4		12,9	31,9			
148	— Length Of Stay (LOS)		3	3	3	3	3		6	1,2			
149	— Turn Over Interval (TOI)		4,5	4,4	4,3	4,2	4,1		3	1,1			
150	— Bed Turn Over (BTO)		60	60	60	55	55		81	115			
160	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi		10	10	10	10	10		10	10		2,00	2,00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
161	Jumlah Dokumen Pengelolaan keuangan		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00
162	Jumlah Dokumen Pengelolaan barang		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00
163	Jumlah Regulasi bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0,00	1,00
165	Terpenuhinya administrasi perkantoran di Dinkes		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
166	Terpenuhinya sarana prasarana aparatur di Dinkes		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
167	Terpenuhinya pakaian dinas di Dinkes g		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00
168	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100	100	95,97	100	94,76	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
169	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	100	100	100	100	100	100	99,86	99,88	99,73	100	100
170	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	100	95,65	99,95	97,02	100	100
171	Pelayanan kesehatan balita	100	100	100	100	100	100	100	94,44	81,04	90,23	100	100
172	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100	97,81	19,87	84,7	100	100
173	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	100	100	100	100	100	100	12,43	31,47	25,29	35	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
174	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	100	100	100	100	100	100	61,03	60,14	70,19	71	75
175	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	100	100	100	100	100	100	17,48	11,12	10,69	12	30
176	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	100	100	100	100	100	100	134,54	100	42,21	100	100
177	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	100	100	100	100	100	100	69,42	73,5	97,74	75	100
178	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100	100	100	100	100	100	100	79,68	39,76	100	80	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM / IKK	Target Renstra SKPD						Realisasi capaian			Proyeksi	
			TAHUN										
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022	2023
179	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	100	100	100	100	100	100	134,79	80,79	100	100	100
180	Indeks Keluarga Sehat	1				0,8	0,8	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18

Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diukur melalui pencapaian indikator kinerja utama yaitu kejadian kematian ibu, bayi dan balita, serta kasus gizi buruk yang ada di masyarakat.

Disamping itu kejadian kematian juga dapat digunakan sebagai indikator dalam penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tingkat angka kematian, namun tidak mudah untuk menemukan faktor yang paling dominan. Tersedianya berbagai fasilitas atau faktor akseptabilitas dan pelayanan kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan tradisional yang bertentangan dengan kesehatan. Kehidupan modern dalam bidang kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap tingkat angka kematian tersebut.

1. Angka Kematian Ibu Maternal (AKI)

AKI mencerminkan resiko yang dihadapi oleh seorang ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan yang dipengaruhi oleh status gizi, keadaan sosial ekonomi, keadaan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, kejadian berbagai komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk pelayanan prenatal dan obstetri. Tingginya AKI menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Angka Kematian ibu di Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 191,64 per 100.000 kelahiran hidup dengan 27 kasus kematian ibu. Jika dibandingkan dengan target tahun 2021, yaitu 61/ 100.000 per Kelahiran Hidup, maka capaian AKI sebesar 31,83%, atau tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan

capaian tahun lalu, yang mencapai 81%, maka terjadi kenaikan yang signifikan yaitu mencapai 100%.

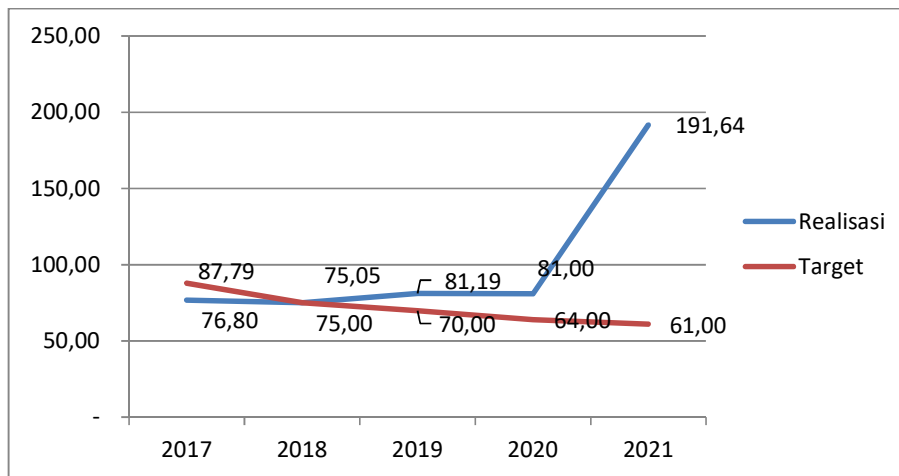
Kenaikan AKI yang cukup tajam tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kasus covid pada Ibu hamil, ibu bersalin dan Nifas. Dari 27 kematian ibu tersebut, 19 kasus diantaranya merupakan kematian ibu karena infeksi Covid-19. Sedangkan sisanya disebabkan oleh PEB/ Eklamsia 3 kasus, HIV AIDS 1 kasus, Penyakit jantung 1, Penyakit penyerta lain 3 kasus. Tempat kematian 26 di Rumah sakit, dan 1 kasus meninggal di rumah karena penyakit jantung yang tidak terdeteksi.

Berikut tabel target dan pencapaian AKI kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 dan tahun 2021.

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target akhir Renstra
Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	81	61	191,64	61

Dalam 5 tahun terakhir, capaian AKI di Kabupaten Purbalingga tercatat mengalami tren yang fluktuatif, dimana AKI mengalami penurunan pada dua tahun terakhir namun kembali naik pada tahun 2019 dan 2020, hingga kenaikan signifikan di tahun 2021 yang dipengaruhi oleh adanya pandemi covid-19. Adanya kenaikan tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja penurunan AKI masih perlu ditingkatkan dan tetap menjaga konsistensi agar kinerja program tetap pada jalur yang benar dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Apalagi dengan adanya pandemi covid-19, semakin memberatkan tantangan ekstra bagi Dinas Kesehatan untuk mewujudkan target turunya AKI sesuai harapan.

Tren capaian AKI di Kabupaten Purbalingga dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Dibandingkan dengan pencapaian AKI rata-rata di provinsi Jawa Tengah, tren AKI hingga tahun 2020 terlihat pola yang sama yaitu cenderung fluktuatif, namun purbalingga memiliki angka capaian yang lebih baik dari rata-rata capaian provinsi Jawa Tengah.



Sumber data : Buku Saku Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2020

Tingginya kasus kematian ibu tidak lepas dari adanya pandemi covid-19. Dari 27 kematian ibu di Kabupaten Purbalingga, 19 kasus diantaranya merupakan kematian ibu karena infeksi Covid-19. Sedangkan

sisanya disebabkan oleh PEB/ Eklamsia 3 kasus, HIV AIDS 1 kasus, Penyakit jantung 1, Penyakit penyerta lain 3 kasus. Tempat kematian 26 di Rumah sakit, dan 1 kasus meninggal di rumah karena penyakit jantung yang tidak terdeteksi. Jumlah kematian ibu tertinggi terdapat di Puskesmas Kalimanah dan Kutasari yaitu sebanyak 5 Kasus.

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan AKI antara lain:

- Sebagian besar Kematian Ibu disebabkan karena pendarahan dan kematian paling banyak terjadi di RS Daerah dan RS swasta
 - Terdapat kematian ibu akibat mengidap covid-19
 - Masih ada RS swasta yang belum PONEK dan terpaksa melayani persalinan
 - Terjadi penurunan capaian KIA terkait dengan pandemi covid
 - Kurangnya dukungan pimpinan dan linsek terhadap kegiatan penurunan kematian Ibu, bayi dan balita
 - Realisasi SK Tim Penurunan AKI AKB belum bekerja secara maksimal
 - Masih banyak ditemukan kasus risti pada ibu hamil
 - Masih banyak ibu hamil, remaja putri yang tidak mengkonsumsi TTD
 - Masih banyak ibu hamil yang belum mau mengkonsumsi PMT Biskuit
- Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut :
- Meningkatkan skrining Bumil Risti dan melakukan pemeriksaan oleh dokter Ahli Kandungan dengan membawa bumil risti ke RS terdekat, meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang 5 NG serta kegiatan 1000 HPK baik di tingkat Kabupaten sampai ke Desa (RT/RW)
 - Mengadakan pertemuan virtual untuk menyampaikan materi / informasi update ke Puskesmas
 - Meningkatkan penegakan aturan RS Ponek dan upaya membangun RS swasta agar menjadi RS PONEK agar
 - Implementasi Regulasi seperti SK tim AKI AKB Kab dimaksimalkan

- Dukungan PEMDA dan OPD lain untuk memprioritaskan program kesehatan.

Dalam upaya penurunan AKI, Dinas Kesehatan melaksanakan strategi Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya :

- a. Penyelenggaraan pelayanan KIA, yang meliputi :
 - 1) Penemuan kasus risiko tinggi dan tindak lanjutnya
 - 2) Penguatan Distric Team Probling Solving(DTPS) di Kabupaten Purbalingga,
 - 3) Pelacakan kematian maternal perinatal,
 - 4) Pendampingan KIA, remaja dan usila di Puskesmas
 - 5) Penguatan pelayanan Antenatal Care (ANC), Perinatal Care (PNC) dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal sesuai standar
 - 6) Review program KIA tingkat Kabupaten,
 - 7) Review pelaksanaan ANC, PNC dan SOP kegawatdaruratan obstetri neonatal,
 - 8) Penguatan manajemen dan jejaring pelayanan persalinan dan rujukan tingkat Kabupaten dan Regional,
 - 9) Penguatan Program Perencanaan Pertolongan Persalinan dan Komplikasi (P4K),
 - 10)Pembelajaran hasil rekomendasi Audit Maternal Perinatal (AMP),
 - 11)Penguatan koordinasi perencanaan, evaluasi program Gizi, KIA dan validasi data,
 - 12)Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan dan pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA),
 - 13)Analisis AMP tingkat kabupaten
 - 14)Penguatan Puskesmas mampu tatalaksana PKPR,
 - 15)Pengembangan screening hipotiroid kongenital.
- b. Pemantauan Wilayah Setempat KIA, yang meliputi :
 - 1) Analisis, penelusuran data kohort dan rencana tindak lanjut,
 - 2) Pembinaan teknis program KIA, reproduksi dan KB

3) Penguatan penyeliaan fasilitatif.

Strategi tersebut diimplementasikan dalam program kerja Dinas Kesehatan dalam upaya mencapai target indikator derajat kesehatan. Program yang bersifat langsung mengarah ke indikator penurunan AKI yaitu Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut dan didukung Program Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Program Playanan Kesehatan Ibu dan Anak, Remaja dan Usia Lanjut tersebut terdiri dari 2 (dua) kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dan dana BOK non fisik, meliputi :

- a. Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
- b. Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut

Sedangkan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat terdiri dari satu kegiatan yaitu Jaminan Persalinan (Jampersal) yang bersumber dari APBN.

Adapun program lain yang secara tidak langsung mendukung upaya penurunan AKI. Program-program tersebut antara lain :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan
2. Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan soisal ekonomi. Apabila AKB tinggi pada suatu wilayah, maka status kesehatan di wilayah tersebut rendah.

AKB Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 9,72 per 1.000 kelahiran hidup atau sebanyak 137 kasus. Capaian target AKB tercapai

62,73, turun dari capaian tahun lalu yang mencapai 83,66%, yaitu pada angka 7,77 per 1.000 kelahiran hidup.

Jumlah kematian bayi tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol yaitu sebanyak 16 Kasus, sedang terendah adalah Puskesmas Kalikajar dengan 0 Kasus.

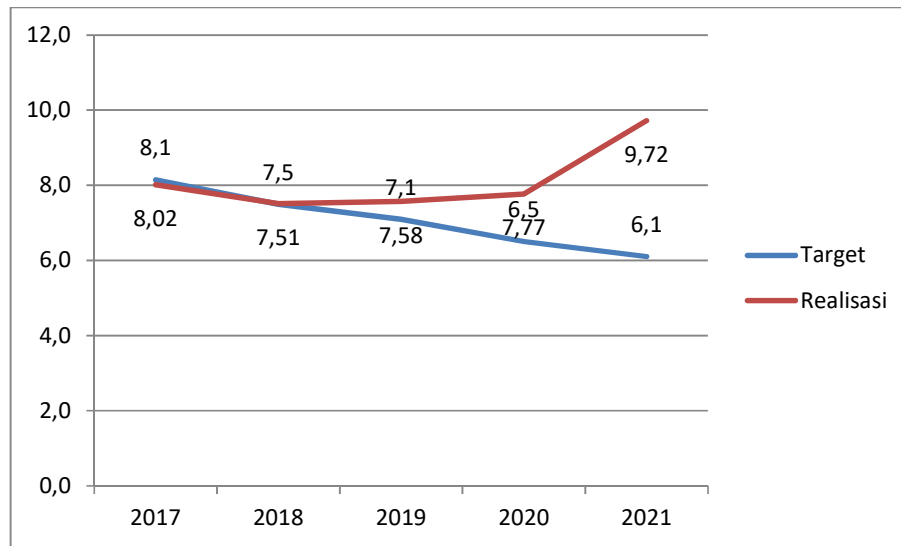
Penyebab kematian bayi di usia 0–28 hari diantaranya adalah BBLR sebanyak 40 kasus dengan prematur 25 kasus, covid 5 kasus, asfiksia 12 kasus, kelainan jantung 11 kasus, kelainan kongenital lainnya 15 kasus serta penyebab lain lain.

Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Tren AKB dalam 5 tahun terakhir mengalami kondisi yang fluktuatif. Dalam 2 tahun berturut-turut mengalami penurunan namun kembali naik di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

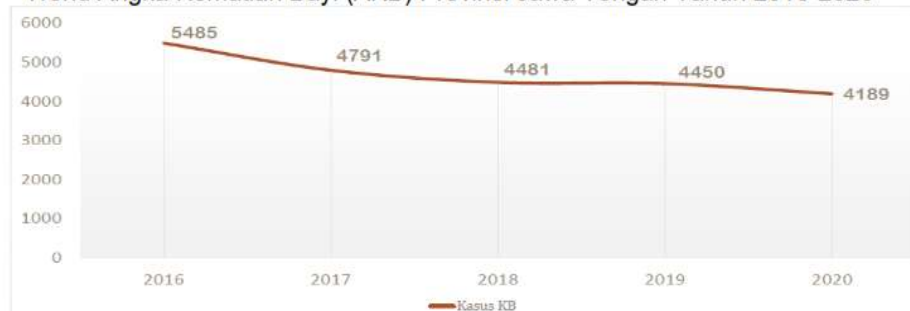
Kenaikan ini menunjukkan perlunya peningkatan dan konsistensi kinerja program penurunan AKB yang melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Tren AKB dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Dibandingkan dengan capaian AKB Propinsi Jawa Tengah, AKB di Kabupaten Purbalingga memiliki tren yang sama yaitu terus menurun hingga tahun 2020. Namun di Kabupaten Purbalingga kembali mengalami kenaikan di Tahun 2021.

Trend Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi 0-1th (per 1.000 KH)	9,99	8,93	8,37	8,22	7,79

Sumber data : Buku Saku Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2020

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan AKB antara lain:

- Pelaksanaan Kunjungan Neonatus (KN) dilaksanakan oleh sebagian bidan belum sesuai prosedur yang seharusnya.
- Kompetensi bidan dalam pelaksanaan KN masih kurang

- Fasilitas pelayanan untuk KN masih kurang memadai. Masih banyak Bidan Desa yang belum memiliki kelengkapan alat pelayanan KN
- Masih tingginya kasus kematian bayi akibat BBLR dan kelainan bawaan
- Peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKB masih kurang optimal, sehingga sektor kesehatan belum mendapat dukungan yang baik dari sektor-sektor lain sehingga upaya penurunan AKB belum mencapai hasil yang optimal.

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut :

- Supervisi dan pembinaan Bidan terkait peningkatan kedisiplinan penerapan prosedur pelayanan KN.
- Peningkatan kapasitas dan kompetensi bidan melalui pelatihan-pelatihan.
- Pemenuhan fasilitas pelayanan KN secara bertahap.
- Optimalisasi peran Lintas Sektor dalam upaya penurunan kematian bayi dan koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam analisis pencegahan kematian bayi.

Strategi dalam upaya penurunan AKB merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usila melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan AKB yaitu Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usia Lanjut melalui kegiatan-kegiatan Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut.

Adapun program lain yang secara tidak langsung mendukung upayan penurunan AKB. Program-program tersebut antara lain :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan

3. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA merupakan jumlah kematian Balita 0-5 tahun di satu wilayah per 1000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. Kematian Balita didalamnya mencakup jumlah kematian bayi umur 0-11 bulan. AKABA menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan Balita, tingkat pelayanan KIA/ Posyandu dan kondisi sanitasi lingkungan.

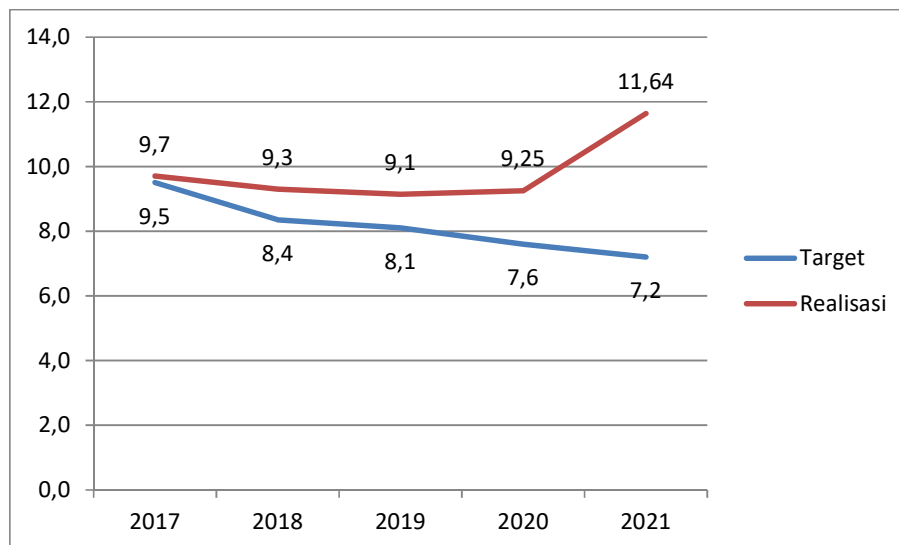
Angka Kematian Balita Kabupaten Purbalingga tahun 2021 sebesar 11,64 per 1.000 kelahiran hidup. Dilihat dari jumlah kasusnya, tercatat tahun 2021 sebanyak 164 kasus kematian, naik dibandingkan tahun lalu yaitu 137 kasus kematian. Target tahun 2021 adalah 7,2 per 1000 Kelahiran Hidup, sehingga capaian targetnya hanya 61,85. Tahun lalu capaian target mampu mencapai 82,16.

Penyebab kematian Balita sebagian besar sama dengan penyebab kematian bayi namun penyebab lainnya adalah kelainan bawaan, penyakit pneumoni, diare serta kecelakaan.

Jumlah kematian balita tertinggi terdapat di Puskesmas Karangmoncol yaitu sebanyak 17 kasus yang terdiri dari 11 kasus kematian bayi 0-11 bulan dan 1 kasus kematian anak Balita 1-5 tahun.

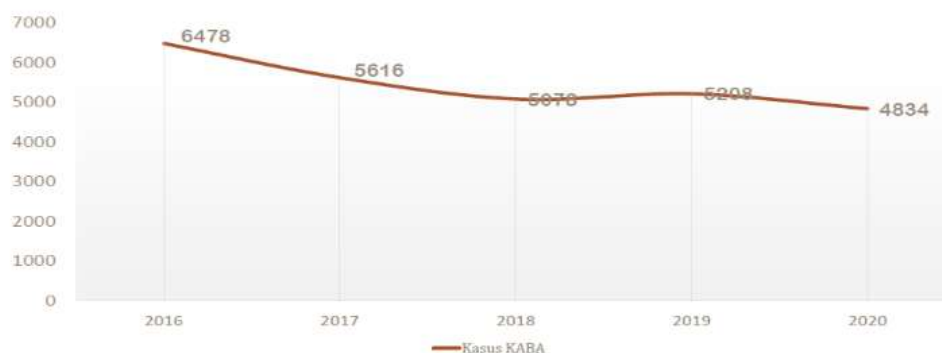
Upaya yang dilakukan guna menurunkan AKABA merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usia melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya

Tren AKABA dalam 3 tahun terakhir masih terlihat positif dimana grafik menunjukkan tren yang cenderung menurun, walaupun belum memenuhi target. Namun pada 2 tahun terakhir, pencapaian perlahan naik kembali, sebagaimana grafik dibawah ini.



Dibandingkan dengan pencapaian AKABA rata-rata di propinsi Jawa Tengah, tren AKABA terlihat pola yang lebih baik pada capaian AKABA Propinsi Jateng, sebagaimana grafik berikut :

Tren Angka Kematian Balita di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016- 2020



Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Balita 1-5th (per 1.000 KH)	11,8	10,47	9,48	9,63	8,99

Sumber data : Buku Saku Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, tahun 2019

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan AKABA antara lain:

- Pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) belum optimal. Pemantauan pertumbuhan Balita belum terpantau dengan baik oleh tenaga kesehatan.
- Fasilitas pelaksanaan SDIDTK di Puskesmas dan Desa masih kurang memadai.
- Pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas belum optimal
- Masih tingginya kasus penyakit menular yang berpengaruh terhadap kematian Balita.
- Peran lintas sektor dalam upaya penurunan AKB masih kurang optimal, sehingga sektor kesehatan belum mendapat dukungan yang baik dari sektor-sektor lain sehingga upaya penurunan AKB belum mencapai hasil yang optimal.

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut :

- Optimalisasi pelaksanaan kegiatan SDIDTK dan peningkatan kompetensi bidan melalui pelatihan SDIDTK
- Pemenuhan fasilitas penunjang kegiatan SDIDTK secara bertahap.
- Optimalisasi pelaksanaan MTBS di Puskesmas
- Pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama yang sangat rentan terhadap usia Balita.
- Optimalisasi peran Lintas Sektor dalam upaya penurunan AKI.
- Koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam analisis pencegahan kematian Balita.

Strategi dalam upaya penurunan AKABA merupakan satu kesatuan dengan upaya penurunan AKI yaitu Peningkatan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan usia melalui upaya-upaya sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan AKABA yaitu Program Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, Remaja dan Usia

Lanjut melalui kegiatan-kegiatan Fasilitasi Upaya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi dan Peningkatan Pelayanan KIA, Remaja dan Usia Lanjut.

Adapun program lain yang secara tidak langsung mendukung upaya penurunan AKB. Program-program tersebut antara lain :

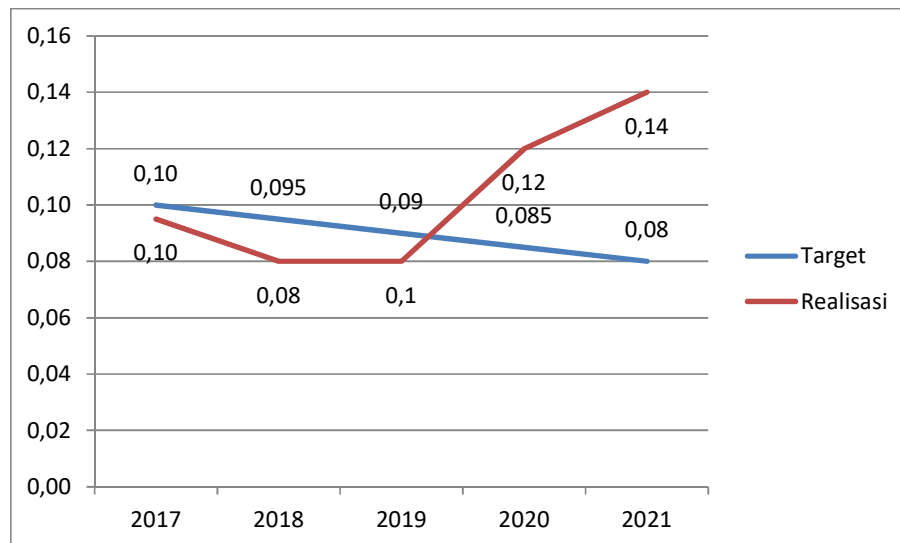
- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan Prevalensi Balita Gizi Buruk

Perkembangan keadaan gizi masyarakat yang dapat dipantau berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan (RR) program Perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dalam hasil penimbangan balita setiap bulan di Posyandu. Data tahun 2021 jumlah Balita yang dilaporkan sejumlah 69.196 Balita, dari jumlah tersebut yang datang dan ditimbang 61.202 Balita (88,45%). Jumlah Balita gizi kurang yang ditemukan sebanyak 2.020 (2.99%) sedangkan untuk kasus gizi buruk pada tahun 20201 terdapat 95 kasus dan semuanya telah mendapatkan penanganan perawatan, dengan angka prevalensi Balita gizi buruk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 sebesar 0,14%.

Jika dibandingkan dengan target prevalensi gizi buruk tahun 2020 yaitu sebesar 0,08%, maka capaian tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu hanya mencapai 56,85%. Capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 70,83%. Jumlah total kasus gizi buruk yang tercatat tahun ini juga melonjak dari tahun lalu yaitu dari 85 kasus menjadi 95 kasus.

Tren angka prevalensi gizi buruk Kabupaten Purbalingga dalam 3 tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif. Namun pada 2 tahun terakhir, angka prevalensi gizi buruk menunjukkan grafik meningkat

yang cukup signifikan. Tren gizi buruk dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik dibawah ini.



Kenaikan ini menunjukkan perlunya evaluasi, peningkatan dan konsistensi kinerja program penurunan gizi buruk yang melibatkan berbagai pihak yang terkait, agar capaian kinerja dapat tercapai sesuai target.

Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara penilaian status gizi balita adalah dengan pengukuran antropometri yang menggunakan indeks Berat Badan dan Tinggi Badan (BB/TB).

Kendala-kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan upaya penurunan angka prevalensi gizi buruk antara lain :

- Penatalaksanaan kasus gizi buruk belum dijalankan sesuai prosedur medis yang telah ditetapkan.
- Banyaknya kasus komplikasi pada penderita gizi buruk sehingga menyulitkan proses pemulihan
- Kesadaran masyarakat tentang pola asuh dan pengetahuan gizi masih cukup rendah sehingga anak rentan mengalami gizi buruk
- Faktor lingkungan, air bersih dan PHBS yang kurang sehat masih cukup banyak ditemui di masyarakat.

- Peran lintas sektor belum optimal sehingga penanganan dan pencegahan kasus gizi buruk belum dilaksanakan secara terpadu.

Solusi penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut :

- Supervisi dan pengawasan pelaksanaan prosedur medis penanganan kasus gizi buruk, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
- Pemberantasan dan pencegahan penyakit yang dapat menjadi komplikasi pada kasus gizi buruk
- Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola asuh anak, gizi keluarga, lingkungan dan PHBS melalui penyuluhan-penyuluhan baik dari tenaga kesehatan maupun pihak desa.
- Optimalisasi peran Lintas Sektor dan dalam upaya penurunan gizi buruk dan koordinasi rutin yang melibatkan semua pihak yang terkait dalam analisis pencegahan gizi buruk.

Strategi dalam penurunan prevalensi gizi buruk yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan yaitu melakukan upaya peningkatan pelayanan gizi masyarakat, yang meliputi :

- a. Pemantauan pertumbuhan Balita,
- b. penatalaksanaan kasus gizi buruk,
- c. pemberian suplemen gizi,
- d. fasilitasi peningkatan ASI eksklusif,
- e. pemantauan kasus gizi buruk pada Balita,
- f. peningkatan kapasitas petugas dalam tatalaksana gizi buruk di RS,
- g. Peningkatan kapasitas petugas dalam pemantauan pertumbuhan,
- h. Peningkatan kapasitas petugas dalam konseling menyusui,
- i. Sosialisasi pedoman gizi seimbang,
- j. Implementasi PP-ASI,
- k. Workshop dan lomba kreasi menu seimbang.

Program yang dilaksanakan dalam upaya penurunan angka prevalensi gizi buruk Program Perbaikan Gizi Masyarakat, yang mencakup 3 (tiga) kegiatan antara lain :

- a. Pencegahan Penanggulangan Masalah KEP, AGB, KVA dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
- b. Usaha Perbaikan Gizi Institusi (UPGI)
- c. Pembinaan Kadarzi dan Survei PSG

Adapun program lain yang secara tidak langsung mendukung upaya penurunan AKB. Program-program tersebut antara lain :

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
 - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Pengawasan Obat dan Makanan
5. Cakupan Kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Pencegahan dan pengendalian penyakit menular merupakan upaya terpadu yang meliputi upaya preventif, promotif dan kuratif untuk mencegah dan mengendalikan penyakit menular dalam rangka mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular tahun 2021 sebesar 60,28% dari target yang akan dicapai yaitu 62%, sehingga capaian terget sebesar 97,22%. Dibandingkan capaian target tahun lalu, terdapat penurunan. Tahun lalu mencapai 105,75%.

Indikator penentu dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular di sesuaikan dengan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, yaitu pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit TB dan HIV/AIDS.

1) Tuberkulosis (TB)

Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada orang terduga TB di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan TB sesuai standar bagi orang terduga TB meliputi :

- 1) Pemeriksaan klinis
- 2) Pemeriksaan penunjang
- 3) Edukasi

Kendala dalam Penemuan kasus Tuberculosis (TB) adalah masih adanya missing case di fasyankes terutama difasyankes Non Pemerintah / swasta seperti klinik dan DPM (Dokter Praktek Mandiri) . Untuk diagnosa penegakan kasus TB sekarang menggunakan alat TCM (Tes Cepat Molekuler) yang di Kabupaten Purbalingga sudah ada di 5 Fasyankes yaitu di RSUD Dr Goeteng Taroenadibrata, Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Kutasari, Puskesmas Mrebet dan Puskesmas Kaligondang. Untuk memenuhi target Eliminasi TBC pada tahun 2030 terus diupayakan dengan berbagai cara dan strategi agar penderita TB dapat sedini mungkin ditemukan dan segera di obati sampai sembuh sehingga diharapkan tidak menularkan lagi kepada orang lain. Berikut Cakupan indicator program TB dalam RPJMD 2021 -2026 adalah sebagai berikut :

- Capaian Case Notification Rate (CNR) TB /100.000 pendd. Tahun 2021 : 98 dari target : 150
- Angka penemuan semua kasus TB tahun 2021 : 51 %, sedangkan target : 69 %
- Jumlah kasus TB MDR/ TB kebal obat thn 2021 : 20 orang, sehingga akumulasi jumlah kasus TB MDR Tahun 2012 s/d 2021 sebanyak : 123 orang
- SPM Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar : 57 %

Capaian indikator program belum memenuhi target dikarenakan beberapa hal antara lain : di masa pandemi covid-19 kegiatan pelacakan/pencarian suspek TB mengalami kendala karena kader agak takut untuk memotivasi pengambilan dahak, suspek yang sudah diberikan pot sputum terkadang tidak kembali, sistem transportasi spesimen sitrust sempat berhenti karena petugas kantor Pos agak takut terjadi penularan

covid-19 dan petugas laborat juga sibuk dengan kegiatan traching dan pengambilan rapid antigen covid-19. Jika kita bandingkan dengan capaian program sebelum pandemi covid-19 (th.2019) , capaian masih di atas target.

Dalam mencapai target eliminasi TBC Nasional pada tahun 2030 dan eliminasi TBC Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2028, kegiatan dalam rangka penemuan kasus dan memenuhi target SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang Kesehatan antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan kegiatan investigasi kontak yang difasilitasi oleh Provinsi dengan jumlah kontak diperiksa : 4.882 , jumlah kontak yang dirujuk untuk pemeriksaan TBC dengan alat TCM : 92 dan jumlah kontak terkonfirmasi TBC : 3 orang
- 2) Melaksanakan program inovasi GEMPUR TOSS TB (Gerakan Membara Purbalingga Temukan TBC Obati Sampai Sembuh) dengan sasaran 44 Desa / Kelurahan
- 3) Melaksanakan Jejaring kerjasama dengan Yayasan MSI (Mentari Sehat Indonesia) Kabupaten Purbalingga dalam rangka penemuan suspek/kasus TBC dan pengobatan
- 4) Membentuk DPPM (Distric Public Private Mix) untuk mengkoordinir jejaring dengan fasyankes Pemerintah maupun Non Pemerintah dalam rangka pelayanan kesehatan
- 5) Membentuk KOPI TB (Koalisi Organisasi Profesi Indonesia) untuk penanggulangan TBC
- 6) Kerjasama dengan PT. Pos dan Giro untuk pelaksanaan aplikasi SITRUST (Sistem Informasi Treking Untuk Transportasi Spesimen) dalam pengiriman spesimen dahak
- 7) Membentuk desa siaga TBC yang merupakan program pemberdayaan masyarakat dalam kepedulian masyarakat untuk penanggulangan TBC
- 8) Melakukan koordinasi dan Jejaring dengan Fasyankes swasta seperti Klinik, dan DPM (Dokter Praktek Mandiri)

Dari strategi dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penemuan kasus TB di Kabupaten Purbalingga masih ada kendala dalam capaian program seperti kurangnya dukungan dari Lintas sektor untuk penyusunan RAD Penanggulangan TBC , penemuan kasus melalui aplikasi wifi TB berhenti, kegiatan pertemuan melalui daring/zoom selama masa Pandemi Covid -19 kurang efektif, serta kendala dari suspek TB untuk mengeluarkan dahak yang baik sering mengalami kesulitan untuk pemeriksaan TCM.

2) HIV/ AIDS

Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yaitu Human Immunodeficiency Virus(HIV)/AIDS di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi:

1) Edukasi perilaku berisiko

2) Skrining

Orang dengan risiko terinfeksi virus HIV yaitu :

- Ibu hamil, yaitu setiap perempuan yang sedang hamil.
- Pasien TBC, yaitu pasien yang terbukti terinfeksi TBC dan sedang mendapat pelayanan terkait TBC
- Pasien Infeksi Menular Seksual (IMS), yaitu pasien yang terbukti terinfeksi IMS selain HIV dan sedang mendapat pelayanan terkait IMS
- Penjaja seks, yaitu seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebagai sumber penghidupan utama maupun tambahan, dengan imbalan tertentu berupa uang, barang atau jasa
- Lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL), yaitu lelaki yang pernah berhubungan seks dengan lelaki lainnya, sekali, sesekali atau secara teratur apapun orientasi seksnya (heteroseksual, homoseksual atau biseksual)

- Transgender/Waria, yaitu orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan jenis kelamin atau seksnya yang ditunjuk saat lahir, kadang disebut juga transeksual.
- Pengguna napza suntik (penasun), yaitu orang yang terbukti memiliki riwayat menggunakan narkotika dan atau zat adiktif suntik lainnya.
- Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yaitu orang yang dalam pembinaan pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan telah mendapatkan vonis tetap.

Data Kasus HIV/AIDS 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah kasus setiap tahunnya, tetapi di tahun 2021 Kasus HIV/AIDS menurun. Penemuan kasus HIV di perkirakan baru sekitar 36 % dari estimasi. Semakin banyak kasus yang ditemukan dan diobati semakin baik karena diharapkan tidak terjadi penularan lebih banyak lagi sehingga target *Three Zero* bisa tercapai yaitu :

- zero new infection yaitu tidak ditemukan lagi penularan kasus baru
- zero AIDS related death, yaitu tidak ada lagi kematian hubungannya dengan HIV/AIDS
- zero discrimination yaitu tidak ada lagi diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS

Strategi untuk mencapai Three zero dengan fast track yaitu 90 % penderita ditemukan, 90 % yang ditemukan mendapat pengobatan/diobati, dan 90 % mereka yang dapat pengobatan bisa mengalami supresi viraload dan mempertahankan hidupnya

Data penemuan kasus HIV/AIDS 5 tahun terakhir sebagai berikut :

- Tahun 2017 : 81 orang (HIV : 73 AIDS : 8)
- Tahun 2018 : 87 orang (HIV : 59 AIDS : 28)
- Tahun 2019 : 89 orang (HIV : 61 AIDS : 28)
- Tahun 2020 : 109 oran (HIV : 62 AIDS : 47)
- Tahun 2021 : 62 orang (HIV : 35 AIDS : 27)

SPM pelayanan kesehatan pada orang berisiko terinfeksi HIV sesuai standar : 86 %.

Untuk penemuan kasus baru HIV Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah memberlakukan Perbup No.50 Tahun 2019 tentang pelaksanaan konseling HIV pra nikah bagi calon pengantin. Untuk Triple Eliminasi tahun 2021, sasaran ibu hamil yang harus diperiksa HIV, Sipilis, dan Hepatitis B adalah : 16.160. Sedangkan capaian hasil kinerja sebagai berikut :

- Ibu hamil diperiksa HIV : 13.948 (86,3 %)
- Ibu hamil diperiksa Sipilis : 13.948 (86,3 %)
- Ibu hamil diperiksa HBSAg : 13.956 (86,4 %)

Target capaian triple eliminasi adalah 80 % dari sasaran.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS , maka kegiatan akselerasi dalam rangka pencapaian 90 % -90 % -90 % dan Three zeroes pada tahun 2030 antara lain :

- Mengembangkan 10 layanan VCT pada Puskesmas dan RS menjadi layanan PDP (Perawatan, Dukungan dan Pengobatan) bagi ODHA
- Memperkuat kolaborasi dengan organisasi profesi, organisasi keagamaan, media massa dalam pencegahan dan pengendalian HIV menuju eliminasi 2030
- Melaksanakan bulan layanan VCT di semua fasyankes baik Rumah Sakit, Puskesmas, pada momen Hari Aids Sedunia di bulan Desember
- Melakukan konseling dan tes HIV pada karyawan di beberapa Perusahaan dan tempat-tempat khusus seperti tempat hiburan/karaoke, Lapas, Sekolah dan Pondok pesantren.

Permasalahan utama dalam penemuan kasus adalah kesadaran masyarakat untuk memeriksakan HIV secara sukarela masih sangat rendah. Sementara masih ada beberapa ODHA yang tidak open status, belum minum obat ARV atau berhenti minum ARV, sehingga masih potensi untuk menularkan kepada orang lain.

6. Cakupan Kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular

Capaian kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit menular sebesar 61,54% dari target yang akan dicapai yaitu 54%, sehingga capaian target sebesar 113,96%. Capaian tersebut melampaui target tahun 2021, sama seperti capaian tahun lalu sebesar 126,42%.

Indikator yang digunakan dalam menilai kinerja pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular sebagaimana disebutkan dalam SPM, yaitu pelayanan terhadap pasien hipertensi, Diabetes Melitus dan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.

a. Pelayanan Hipertensi

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan hipertensi adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi:

- Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
- Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
- Melakukan rujukan jika diperlukan

Sasaran pelayanan kesehatan penderita hipertensi sebanyak 280.868 orang sedangkan yang berhasil dilayani sebanyak 28.095 orang di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, terutama Puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten. Dengan demikian cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2021 sebanyak 10,00%. Cakupan tersebut mengalami penurunan dari tahun 2020 sebanyak 11,12%.

Sasaran strategis tercapainya pelayanan kesehatan untuk penderita Hipertensi sesuai standar targetnya sebesar 100%. Di tahun 2021 pencapaiannya sebesar 10,00%, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang pencapaiannya sebesar 11,12%. Proporsi fasyankes

yang melaporkan kasus hipertensi targetnya 100% dan realisasinya 100%.

b. Pelayanan Diabetes Melitus (DM)

Sebagaimana pelayanan terhadap penderita hipertensi, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar meliputi:

- Pengukuran gula darah;
- Edukasi
- Terapi farmakologi.

Pada tahun 2021, cakupan pelayanan terhadap penderita Diabetes Melitus mengalami penurunan meskipun masih diatas standar Kementerian Kesehatan, yaitu 100%. Cakupan pada tahun 2020 sebesar 112,6%; sedangkan cakupan cakupan pelayanan terhadap penderita Diabetes Melitus pada tahun 2021 sebesar 106,99%.

Sasaran strategis tercapainya pelayanan kesehatan untuk penderita Diabetes sesuai standar sebesar 100%. Pada tahun 2021 pencapaiannya sebesar 106,99%. hal tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2020 yang pencapaiannya sebesar 112,6%; meskipun sebenarnya hal tersebut sudah melampaui target. Proporsi fasyankes yang melaporkan kasus hipertensi targetnya 100% dan realisasinya 100%.

Berdasarkan hasil capaian di atas, belum semua target terpenuhi. Hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa kendala dalam pencapaiannya, antara lain sebagai berikut:

- Masih adanya penderita hipertensi dan penderita diabetes yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita penyakit tersebut, sehingga tidak memeriksakan dirinya ke fasyankes terdekat.
- Masih adanya kurang koordinasi terkait pendataan sasaran di wilayah

- Masih adanya keterlambatan laporan dari puskesmas dan RS/ klinik ke dinas kesehatan
- Keterbatasan anggaran di Dinas Kesehatan, apalagi dengan adanya refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19

Upaya Mengatasi Kendala antara lain :

Secara intensif melakukan penyebarluasan informasi mengenai tujuan dan manfaat pencegahan PTM, khususnya di masyarakat sasaran, oleh UPTD Puskesmas

- Pertemuan petugas lintas program dan lintas sektoral untuk menambah jumlah posbindu, meningkatkan validitas pendataan sasaran dan hasil-hasil kegiatan
- Meningkatkan Supervisi ke puskesmas dan rumah sakit.
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular (PTM)

c. Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Sesuai Standar Pelayanan Minimal, setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Seluruh Puskesmas di Kabupaten Purbalingga sudah memberikan pelayanan sesuai standar terhadap orang dengan gangguan jiwa berat. Jika terdapat pasien yang harus dilakukan rujukan ke Rumah Sakit; kerja sama yang erat dengan Dokter Spesialis Jiwa di semua Rumah Sakit makin mempermudah peningkatan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ tersebut.

Guna meningkatkan koordinasi lintas sektoral atas penanganan ODGJ, telah dibentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) sesuai dengan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 441.3/272 tahun 2012 tentang Penetapan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga. Namun demikian mengingat terbitnya Undang-

Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa dan adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah, Peraturan Bupati tersebut diubah pada tahun 2019 menjadi Keputusan Bupati Nomor 441.3 / 312 tahun 2019 Penetapan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga. Guna menindaklanjuti Keputusan Bupati tersebut dibentuklah TPKJM tingkat Kecamatan yang sosialisasi maupun pembentukannya dilakukan di setiap kecamatan sepanjang tahun 2020.

Pandemi Covid 19 rupanya tidak mempengaruhi pelayanan pengobatan terhadap ODGJ. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan cakupan pelayanan ODGJ dari tahun 2020, sebanyak 73,5% menjadi 78,07% pada tahun 2021. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan Skizofrenia meliputi: (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa; (2) Edukasi. Selain itu dilakukan family gathering keluarga ODGJ dengan mendatangkan Dokter Spesialis Jiwa ke Puskesmas; sehingga tercipta sinergitas yang baik antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan keluarga pasien. Dengan demikian pelayanan ODGJ pada keluarga pasien dalam bentuk pengamatan minum obat dapat terlaksana dengan baik.

Sasaran strategis tercapainya pelayanan kesehatan untuk penderita orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar sebesar 100%. Terdapat peningkatan cakupan pelayanan ODGJ berat dari tahun 2020, sebanyak 73,5% menjadi 78,07% pada tahun 2020.

Sasaran strategis tercapainya pelayanan kesehatan untuk penderita gangguan jiwa berat sesuai standar sebesar 100%. Terdapat peningkatan cakupan pelayanan ODGJ berat dari tahun 2020, sebanyak 73,5% menjadi 78,07% pada tahun 2020. Namun masih terdapat banyak kendala di masyarakat dalam pelayanan penderita gangguan jiwa, karena :

- masih banyak orang yang merasa malu dan menyembunyikan keluarganya yang sakit jiwa.
- Kurangnya koordinasi dalam pendataan sasaran
- Kurangnya tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan Keswa

- Keterbatasan anggaran di Dinas Kesehatan

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan upaya :

- Secara intensif melakukan sosialisasi mengenai kesehatan jiwa
- Pertemuan petugas lintas program dan lintas sektoral untuk meningkatkan validitas pendataan sasaran dan hasil-hasil kegiatan
- Supervisi ke puskesmas dan rumah sakit.
- Mengadakan pelatihan keswa bagi tenaga kesehatan
- Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pelayanan Keswa

Pada tahun 2021 di dapatkan data ODGJ yang terdaftar dan ditangani di fasyankes sejumlah 1.958 orang, dan terdapat 6 penderita gangguan jiwa berat yang dipasung.

Upaya yang telah dilakukan untuk eliminasi ODGJ berat yang dipasung antara lain :

- Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, dengan dibentuknya Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di setiap kecamatan.
- Penderita ODGJ yang dipasung sudah dikirim ke RSJ Dr. Soerojo Magelang, RSUD Banyumas, dan di Klinik H. Mustajab, Bungkel.
- Penderita ODGJ berat yang sudah di rujuk ke RS dan dinyatakan pulih, dikembalikan kekeluarga, untuk kemudian mendapatkan pengobatan rutin di Puskesmas wilayah pasien tinggal.
- Penderita ODGJ berat yang sudah membaik, mendapatkan pengobatan rawat jalan di puskesmas dengan bantuan keluarga untuk mengambil obat.
- Petugas kesehatan jiwa dan dokter Puskesmas mengadakan kunjungan rumah untuk melacak dan memantau penderita ODGJ.
- Untuk penderita ODGJ berat yang sudah bosan meminum obat, diberikan injeksi haloperidol 1 ampul 1 bulan sekali oleh petugas Puskesmas dengan melakukan kunjungan kerumah penderita

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

Mengacu pada permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih, Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Purbalingga maka ditetapkan Isu Strategis Bidang Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 adalah :

1. Masih adanya Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita
2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat
3. Munculnya penyakit infeksi baru yang menyebabkan pandemi secara global yaitu Covid-19.
4. Prevalensi Stunting yang masih tinggi
5. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga
6. Kurangnya kompetensi tenaga kesehatan
7. Kurangnya jumlah puskesmas terhadap rasio jumlah penduduk dan akses rumah sakit yang terpusat di wilayah perkotaan
8. Masih rendahnya indeks keluarga sehat

D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan di Purbalingga, Dinas Kesehatan sebagai *leading sector* merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbagi dalam 5 program yaitu:

1. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari perencanaan awal untuk dapat melaksanakan program/kegiatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dibutuhkan anggaran Rp. 165.644.564.000/tahun.

Karena keterbatasan dana, untuk mengatasi hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disusun dengan prinsip skala prioritas, pemanfaatan dana yang efisien, dan kegiatan yang efektif yang mempunyai daya ungkit guna mencapai visi dan misi pembangunan kesehatan Purbalingga.

E. Penelaahan Usulan Progran dan Kegiatan dari Masyarakat

Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga akan menambah program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD Kabupaten Purbalingga lainnya. Usulan tersebut dapat berupa usulan yang ditujukan secara langsung maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan maupun desa. Masukan dari legislatif melalui pokok pokok pikiran anggota legislatif juga menjadi acuan dasar bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga untuk membuat usulan program/kegiatan. Untuk tahun 2021 ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga seperti yang terlihat pada tabel 2.4

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat (Hasil Musrenbang Kecamatan)

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
Jambanisasi / ODF	Masih ada masyarakat yang belum punya jamban sendiri	kembangan rt 01 rw 06, Kab. Purbalingga	Bukateja	Kembangan
Jambanisasi / ODF	masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban sehat	desa kramat, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Kramat
Jambanisasi / ODF	Kurangnya WC untuk warga dengan lahan sempit	Desa Gandasuli, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Gandasuli
Pengadaan alat kesehatan	Alkes untuk PKD belum lengkap	RT.01/RW.04 Desa Gandasuli, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Gandasuli
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	PUSTU yang sudah usang/tidak layak huni (bangunan rusak berat)	Rt. 004 Rw. 006, Kab. Purbalingga	Bukateja	Kembangan
Pengadaan alat kesehatan	kurangnya alat alat penunjang kesehatan yang berada di desa	desa penaruban, Kab. Purbalingga	Bukateja	Penaruban
Pengadaan alat kesehatan	belum adanya mobil ambulance desa	Kantor Desa Majapura Jl. Menur No.09 RT 02 RW 01 Desa Majapura, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Majapura
Jambanisasi / ODF	Masih Banyak Rumah Tangga yang belum mempunyai jamban sendiri	Dusun1, Dusun 2 dan Dusun 3, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Karangduren
Jambanisasi / ODF	Masih banyak yang belum punya	Limbasari, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Limbasari
Jambanisasi / ODF	masih banyak memiliki jamban sehat	Desa Tajug, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Tajug

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
Pengadaan alat kesehatan	Belum Ada Mobil Siaga Penanganan Kesehatan	RT 02 RW 03 DESA WANOGARA WETAN, Kab. Purbalingga	Rembang	Wanogara Wetan
Jambanisasi / ODF	warga banyak yg belum mempunyai jamban	desa kutasari, Kab. Purbalingga	Kutasari	Kutasari
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Puskesmas Pembantu kondisinya kurang memadai, tidak memiliki lahan parkir dan ruang pelayanan kurang memadai.	Dusun 5 Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Baleraksa
Jambanisasi / ODF	buang air sembarangan	Rajawana, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Rajawana
Jambanisasi / ODF	Masih ada beberapa rumah tinggal yang belum mempunyai jamban rumah tangga mandiri dan perlu adanya bantuan dari Pemerintah Daerah	Jl. Raya Gondang - Sirandu RT 04 RW 03, Kab. Purbalingga	Karangreja	Gondang
Jambanisasi / ODF	masih banyak warga yang membuang BAB di aliran sungai	Dusun I Desa Majapura, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Majapura
Pengadaan alat kesehatan	Desa Baleraksa membutuhkan kendaraan ambulan untuk mengantarkan warga kurang mampu berobat	Desa Baleraksa, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Baleraksa
Jambanisasi / ODF	desa belum odf	Candinata, Kab. Purbalingga	Kutasari	Candinata
Pengadaan alat kesehatan	Alat kesehatan kurang memadai	Desa Purbasari, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Purbasari
Jambanisasi / ODF	Masih Banyaknya Warga Yang Belum Memiliki Jamban Sehat	Desa Onje, Kab. Purbalingga	Mrebet	Onje
Pengadaan alat kesehatan	Alat Kesehatan di Posyandu Belum Lengkap	Pengadaan Alat Kesehatan Untuk 6 Lokasi Di Desa Karangjambu (RW 01, RW 02, RW 03, RW 04,	Karangjambu	Karangjambu

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
		RW 05 dan RW 06), Kab. Purbalingga		
Pengadaan alat kesehatan	saat ini terkendala Pengadaan Mobil Kesehatan karena dana DD Sekarang Difokuskan Untuk Penanganan Bidang Mendesak dan Darurat	Desa Lumpang, Kab. Purbalingga	Karanganyar	Lumpang
Pengadaan alat kesehatan	kesulitan mendapatkan alat transportasi untuk merujuk warga yang sakit dan kurang mampu	Jambudesa, Kab. Purbalingga	Karanganyar	Jambudesa
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Rusaknya gedung Puskesmas Pembantu mengakibatkan terkendalanya pelayanan kesehatan bagi warga Desa Tangkisan	Tangkisan RT 01 RW 05, Kab. Purbalingga	Mrebet	Tangkisan
Jambanisasi / ODF	Masih banyak yang tidak memiliki Jamban	Desa Panusupan Dusun I,II, III, dan IV, Kab. Purbalingga	Rembang	Panusupan
Jambanisasi / ODF	Minimnya perilaku pola hidup sehat dilingkungan	Candiwulan, Kab. Purbalingga	Kutasari	Candiwulan
Jambanisasi / ODF	Masih banyak masyarakat yang buang air besar disungai, saluran air/irigasi , kolam ikan, sehingga berbahaya bagi kesehatan masyarakat.	desa Karangnangka, Kab. Purbalingga	Mrebet	Karangnangka
Jambanisasi / ODF	Masih ada yang belum punya jamban pribadi	Dusun I,II, dan III, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Kalapacung
Jambanisasi / ODF	Masih banyak rumah yang belum memiliki jamban	Dusun I dan Dusun II, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Palumbungan Wetan

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
Jambanisasi / ODF	tingginya tingkat kemiskinan menyebabkan banyak warga yang tidak mampu membangun sarana sanitasi yang layak	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Karanganyar	Maribaya
Pengadaan alat kesehatan	tidak adanya fasilitas ambulan desa untuk membantu warga menuju fasilitas kesehatan dalam keadaan darurat	Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, Kab. Purbalingga	Karanganyar	Maribaya
Jambanisasi / ODF	Tahun boleh memasuki 2022, namun permasalahan seperti BAB di sungai masih ada ada saja. Jika hal tersebut dibiarkan maka akan mencemari lingkungan sungai, maka selain sosialisasi perlu diadakannya program jambanisasi	Karangjengkol, Kab. Purbalingga	Kutasari	Karangjengkol
Pengadaan alat kesehatan	Posyandu balita kekurangan alat kelengkapan posyandu.	Desa Bojongsari, Kab. Purbalingga	Bojongsari	Bojongsari
Pengadaan alat kesehatan	Sarana Ambulan Desa	Desa Pandansari, Kab. Purbalingga	Kejobong	Pandansari
Pengadaan alat kesehatan	kurangnya alat penanganan kesehatan di PKD Desa sehingga kurang maksimal dalam pertolongan pertama kepada masyarakat.	Pangempon Rt 012 rw 006, Kab. Purbalingga	Kejobong	Pangempon
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Perlu adanya pembangunan sarana prasarana halaman Pustu (pagar keliling, pavingisasi, tempat parkir) guna meningkatkan pelayanan kepada pasien.	RT 028 RW 013, Kab. Purbalingga	Kejobong	Bandingan
Jambanisasi / ODF	masih banyak warga yang belum memiliki jamban, sehingga menggunakan sungai untuk MCK	Desa Bojong, Kab. Purbalingga	Mrebet	Bojong

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
Jambanisasi / ODF	Masih ada warga yang BABS dan belum memiliki jamban	Dusun I, II, III Desa Jingkang, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Jingkang
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Belum adanya bangunan gedung Puskesmas Pembantu di Desa Danasari, Desa Danasari jauh dari Puskesmas Kecamatan	Dusun I Rt 06 Rw 01 Desa Danasari, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Danasari
Jambanisasi / ODF	Masih ada warga yang belum memiliki jamban	Dusun I, II, III Desa Danasari, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Danasari
Pengadaan alat kesehatan	Posyandu membutuhkan kelengkapan alat kesehatan untuk menunjang kegiatan posyandu	Desa Danasari, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Danasari
Jambanisasi / ODF	Masih ada warga yang belum memiliki jamban	Desa Sirandu, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Sirandu
Pengadaan alat kesehatan	Kelompok Posyandu membutuhkan kelengkapan Alat Kesehatan untuk menunjang kegiatan Posyandu	Dusun I, II, III Desa Jingkang, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Jingkang
Jambanisasi / ODF	Masih banyak rumah yang belum memiliki septictank	Kembaran Kulon Rt 4 Rw 3, Kab. Purbalingga	Purbalingga	Kembaran Kulon
Jambanisasi / ODF	Banyak rumah tangga yang belum mempunyai jamban atau punya jamban tapi belum sesuai standar kesehatan .	RW 001 s/d RW 006, Kab. Purbalingga	Purbalingga	Purbalingga Lor

Usulan	Permasalahan	Alamat	Kecamatan	Kelurahan
Pembangunan PKD	Gedung PKD kelurahan Purbalingga dulu dibongkar untuk pembangunan SMPN 3 Purbalingga dan sampai saat ini belum dibangun gedung yang baru. selama ini menempati bekas kelas SDN Purbalingga lor yang kondisinya tidak representatif untuk pelayanan kesehatan.	Kompleks Kelurahan Purbalingga lor, Kab. Purbalingga	Purbalingga	Purbalingga Lor
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	rehab gedung puskesmas pembantu Desa Tamansari	dusun 3, Kab. Purbalingga	Karangmoncol	Tamansari
Pembangunan PKD	Rehab Atap PKD	Desa Majapura, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Bobotsari	Majapura
Pembangunan PKD	Desa Adiarsa belum mempunyai gedung PKD	Adiarsa, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kertanegara	Adiarsa
Pembangunan PKD	bangunan yang ada sudah rusak	Rt.001 Rw.001 Desa Krangean, Kab. Purbalingga, Kab. Purbalingga	Kertanegara	Krangean
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Pengadaan Mobil Dobel Garda Untuk Puskesmas Kecamatan (Musrenbangcam)	Desa Karangjambu, Kab. Purbalingga	Karangjambu	Karangjambu
Pembangunan Puskesmas dan Gedung Puskesmas Pembantu	Belum Adanya Lahan Parkir di puskesmas,, Yang mengakibatkan Terhambatnya Lalu lintas (Hasil Usulan Musrenbangcam)	Puskesmas Karanganyar, Kab. Purbalingga	Karanganyar	Karanganyar

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PD

A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Target	TARGET INDIKATOR 20203		
	AKI	AKB	AKABA
RPJMN	194/100.000 KH	17,6/1.000 KH	-
RPJMD JATENG	81/100.000 KH	7,8/1.000 KH	10,43/1.000 KH
PURBALINGGA	74,32/100.000 KH	9,1/1.000 KH	9,12/1.000 KH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembangunan kesehatan Kabupaten Purbalingga jika mengacu pada RPJMN dan RPJMD Jawa Tengah tahun 2018-2023 sudah pada jalan yang benar. Hal ini ditunjukan dari target indikator kesehatan yang ada di Kabupaten Purbalingga lebih tinggi dari target yang ditetapkan oleh Provinsi maupun Nasional. Dengan meningkatkan kinerja dari sumber daya kesehatan dan dukungan lintas sektor serta partisipasi dari masyarakat pada saatnya target tersebut dapat tercapai.

B. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Mengacu pada sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang secara langsung berkaitan dengan urusan kesehatan, Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pembangunan bidang kesehatan, maka tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga adalah “*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat*”, dengan indikator Usia Harapan Hidup

dan sasarannya adalah “Menurunnya Angka Mortalitas dan Morbiditas” dengan indikator:

1. Angka Kematian Ibu (AKI) 74,32/ 100.000 Kelahiran Hidup (KH);
2. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB) 9,1/ 1.000 KH;
3. Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBA) dari 9,12/ 1.000 KH;
4. Indeks Keluarga Sehat 0,18

Indikator program yang juga tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya atau sederajat 51,52 persen
2. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk 2,24/100.000 penduduk
3. Prevalensi stunting (data EPPGM) 15 persen
4. Angka morbiditas 18,6 persen
5. Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar 56,52 persen
6. Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar 49,43 persen
7. Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan 34 persen
8. Persentase Desa/Kelurahan Sehat Mandiri 27,2 persen

C. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - ii. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - iii. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah
 - i. Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Daerah
 - i. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - ii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iii. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - iv. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - v. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - vi. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - ii. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - iii. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - iv. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pembangunan Puskesmas
 - ii. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - iii. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - iv. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - v. Pengadaan Obat, Vaksin
 - vi. Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - vii. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - ii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - iii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - iv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

- v. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- vi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- vii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
- viii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- ix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- x. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- xi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- xii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- xiii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
- xiv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- xv. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- xvi. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- xvii. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- xviii. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- xix. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- xx. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- xxi. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- xxii. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- xxiii. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- xxiv. Operasional Pelayanan Rumah Sakit

- xxv. Operasional Pelayanan Puskesmas
- xxvi. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- xxvii. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- xxviii. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- xxix. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- xxx. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, dengan subkegiatan:
 - i. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
 - ii. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - ii. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - iii. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta

Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- b. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - i. Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan
 - c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - ii. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dengan subkegiatan sebagai berikut:
- a. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), dengan subkegiatan:
 - i. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - b. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan

Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, dengan subkegiatan:

- i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - c. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), dengan subkegiatan:
 - i. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
 - d. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - i. Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - i. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Tabel 4.1

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2023
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024		OPD Pengampu
			Indikator Kinerja	Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
		A. Program Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja		100 persen	101.561.793.000			100 persen	101.826.780.000	
			Persentase temuan pengeloaan anggaran yang ditindaklanjuti		100 persen				100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan kepegawaian administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 persen				100 persen		
			Persentase pengeloaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan		100 persen				100 persen		
			Persentase pengadaan barang milik daerah		100 persen				100 persen		
			Persentase pemeliharaan barang milik daerah		100 persen				100 persen		
			Persentase ketersediaan layanan BLUD		100 persen				100 persen		
1.02.01.2.01		1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan laporan yang tersusun		100 persen	25.000.000			100 persen	25.500.000	
1.02.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinkes	7 Dokumen	20.000.000	DAU	RenjaDPA	2 Dokumen	20.000.000	Dinkes
1.02.01.2.01.07		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinkes	6 dokumen	5.000.000	DAU	SAKIP, LKJIP, LKPI, SPIP	6 dokumen	5.500.000	Dinkes
1.02.01.2.02		2. Administrasi Keuangan	Persentase ASN yang menerima gaji tepat waktu		100%	100.177.114.000			100%	100.356.880.000	
1.02.01.2.02.01		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinkes	1350 orang	99.820.234.000	DAU		1350 orang	100.000.000.000	Dinkes
1.02.01.2.02.02		Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinkes	54 Dokumen	72.125.000	DAU	Fasilitasi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah (54 OH)	54 Dokumen	72.125.000	Dinkes
1.02.01.2.02.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinkes	5 dokumen	284.755.000	DAU		5 Dokumen	284.755.000	Dinkes
1.02.01.2.03		2. Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100 persen	8.000.000			100 persen	9.000.000	
1.02.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinkes	8 Dokumen	8.000.000	DAU	Honorarium Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang dan pengurus barang pembantu	1 Dokumen	9.000.000	Dinkes
1.02.01.2.05		3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang terselesaikan yang tersosialisasikan		100%	10.000.000			100%	11.000.000	
1.02.01.2.05.11		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bintek perundang-undangan	Dinkes	4 orang	10.000.000	DAU	Fasilitasi ASN untuk mengikuti Bintek perundang-undangan	4 orang	11.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06		4. Administrasi Umum	Persentase Administrasi umum dinas yang yang difasilitasi		100%	172.418.000			100%	181.400.000	
1.02.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinkes	1 paket	2.500.000	DAU		1 paket	3.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinkes	1 paket	84.600.000	DAU		1 paket	90.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dinkes	24 Dokumen	2.400.000	DAU		24 Dokumen	2.400.000	Dinkes
1.02.01.2.06.08		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinkes	15 Dokumen	10.000.000	DAU		15 Dokumen	11.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinkes	50 Dokumen	28.425.000	DAU		50 Dokumen	30.000.000	Dinkes
1.02.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinkes	9 dokumen	44.493.000	DAU	Fasilitasi untuk operator SIMDA, OPetaror SIMASET	9 dokumen	45.000.000	Dinkes
1.02.01.2.07		3. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan BMD yang harus disediakan		100%	79.250.000			100%	80.000.000	

1.02.01.2.07.06			Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dinkes	10 unit	79.250.000	DAU	Pembelian laptop untuk bendahara pengeluaran, operator SIMDA dan operator SIMASET. Penggantian AC gudang obat dan ruang server yang sudah rusak	10 unit	80.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08			3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen yang harus dikirim		100%	672.011.000			100%	733.000.000	
1.02.01.2.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinkes	20 Dokumen	1.500.000	DAU		20 Dokumen	3.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinkes	60 Dokumen	251.325.000	DAU		60 Dokumen	260.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.03			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinkes	12 Dokumen	17.174.000	DAU	Jasa pengharum ruangan, baner, spanduk, tinta printer.	12 Dokumen	20.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinkes	12 Laporan	402.012.000	DAU	Fasilitasi untuk tenaga penunjang pemerintah daerah sejumlah 21 org	12 Laporan	450.000.000	Dinkes
1.02.01.2.09			3. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara		100%	418.000.000			100%	430.000.000	
1.02.01.2.08.02			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinkes	39 unit	278.000.000	DAU	Penyediaan BBM operasional, oli dan spare part kendaraan, Pajak kendaraan bermotor	39 unit	280.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.06			Pemeliharaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinkes	40 unit	40.000.000	DAU	Pemeliharaan coldchain, AC, telepon/pabx, jaringan telepon, PC/Notebook. Pemeliharaan peralatan Personal Computer, Peralatan Jaringan, dan pemeliharaan Instalasi-instalasi lain	40 unit	50.000.000	Dinkes
1.02.01.2.08.09			Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinkes	2 unit	100.000.000	DAU	Pemeliharaan 2 gedung bertingkat (gedung kantor tempat bekerja)	2 unit	100.000.000	Dinkes
1.02.02.			B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Status akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Minimal Madya		51,72 Persen	62.728.129.000			52,54 Persen	66.474.985.000	
				Rasio Puskesmas thd jumlah penduduk		2,20 sd 2,25 per 100.000				2,25 sd 2,30 per 100.000		
				Prevalensi Stunting		15 Persen				14 Persen		
				Angka Morbiditas		18,6 Persen				18,1 Persen		
1.02.02.2.01.			1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Cakupan fasilitasi pelayanan primer		100 Persen	32.901.180.000			100 Persen	35.947.479.000	
				Persentase Puskesmas dan RS dengan ketersediaan sapras, alkes sesuai standar		100 Persen				100 Persen		
				Rasio Puskesmas dan RS thd jumlah penduduk		3,2 per 100.000				3,2 per 100.000		
1.02.02.2.01.01			Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	0								
1.02.02.2.01.02			Pembangunan Puskesmas	Jumlah unit bangunan puskesmas yang dibangun sesuai standar	Kutawis, kertanegara	2 unit	3.000.000.000	DAU	Kutawis dan Kertanegara,	2 unit	5.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.03			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
1.02.02.2.01.04			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
1.02.02.2.01.05			Pengembangan Rumah Sakit									
1.02.02.2.01.06			Pengembangan Puskesmas									
1.02.02.2.01.07			Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
1.02.02.2.01.08			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit									
1.02.02.2.01.09			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Bobotsari, Serayu	2 unit	4.500.000.000	DAK		2 unit	5.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.10			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya									
1.02.02.2.01.11			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan									
1.02.02.2.01.12			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
1.02.02.2.01.13			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Gambarsari, 5 desa berprestasi	15 unit	2.332.479.000	DAU, DAK Fisik, DBHCHT	Ambulance 5 unit, Antropometri Kit 25 paket, IPAL Puskesmas Gambarsari, Prasarana Pendukung Telemedicine	15 unit	2.332.479.000	Dinkes

1.02.02.2.01.14			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Gambarsari	152 unit	9.925.055.000	DAK Fisik, DBHCHT	Alkes Telemedicine 7 paket, Alkes Gambarsari: Dental Unit, Bidan Kit, Bed Pasien, Bed Periksa, Partus Kit,	152 unit	10.000.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.15			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Puskesmas	5 unit	0	DAK Non Fisik, DAU		5 unit	-	Dinkes
1.02.02.2.01.16			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Dinkes	1 paket	5.138.602.000	Dak Fisik, DAU		1 paket	5.500.000.000	Dinkes
1.02.02.2.01.17			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Dinkes	1 paket	7.890.033.000	DAU, Dak Fisik	BMHP Pelayanan dasar, Catridge TCM, BMHP Gula Darah	1 paket	8.000.000.000	Dinkes
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang Didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinkes	22 Paket	115.011.000			22 Paket	115.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.			2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan anak usia pendidikan dasar yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen	29.707.889.000			100 Persen	30.399.006.000	Dinkes
				Cakupan pelayanan ibu hamil		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan pelayanan Ibu bersalin		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan pelayanan Bayi Baru Lahir		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan pelayanan Balita		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan pelayanan balita gizi buruk		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan usia lanjut yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan puskesmas yang telah menerapkan K3 internal Puskesmas		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan Desa ODF		82 Persen				88 Persen		
				Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan kegiatan surveilans penyakit menular dan tidak menular yang terselenggara		100 Persen				100 Persen		
				Cakupan kasus KIPI yang diinvestigasi		100 Persen				100 Persen		
1.02.02.2.02.01			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 bumil	231.200.000	DAU, Dak NF	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ANC sesuai standar (K6) dan 10T, peningkatan kapasitas bidan dan AMP	16.214 bumil	250.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.02			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	16.214 Bulin	688.295.000	DAK NF	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan sesuai standar, rujukan terintegrasi dan RTK berfungsi optimal	16.214 Bumil	700.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.03			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Puskesmas	14589 Bayi	155.425.000	DAU, Dak NF	Setiap Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan neonatal esential sesuai standar, peningkatan kapasitas bidan dan AMP	14589 Bayi	160.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.04			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 puskesmas	58.681 Balita	59.645.000	DAU, DAK NF	Seiap balita mendapatkan pelayanan sesuai standar , MTBS dan Imunisasi dasar lengkap	58.681 Balita	60.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.05			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	22 Puskesmas	141976 Anak	109.197.000	DAU, DAK NF	sekolah sehat bias ,pkpr,sbh,poskestren,Scringing gizi,tablert Fe, pmtas,	141976 Anak	115.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.06			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	239 desa	604136 orang	61.813.000	DAU	Pelayanan kesehatan pada calon pengantin dan kespro	604136 orang	65.000.000	Dinkes

1.02.02.2.02.25			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	239 ds	11 Dokumen	178.903.000	DA, DAK NF	program penyakit menular dan tidak menular lainnya : malaria, kusta, diare, Hepatitis, Ispa, DBD, Leptospirosis, Filariasis, Asma, Decomp cordis, Ginjal	11 Dokumen	178.903.000	Dinkes
1.02.02.2.02.26			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinkes	12 Dokumen	16.340.000.000	DAU	2145 Jiwa SKTM 49000 Jiwa JKN 89955 Jiwa KPS	12 Dokumen	16.340.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.27			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah									
1.02.02.2.02.28			Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional									
1.02.02.2.02.29			Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat									
1.02.02.2.02.30			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan									
1.02.02.2.02.31			Pengelolaan Penelitian Kesehatan									
1.02.02.2.02.32			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kab. Purbalingga	8 Dokumen	10.000.000	DAU	8 RS	8 Dokumen	10.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.33			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kab. Purbalingga	22 Dokumen	19.040.000	DAU	22 Dokumen	22 puskesmas	20.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.34			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kab. Purbalingga	1 Dokumen	210.000.000	DAU	26 fasyankes	1 Dokumen	210.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.35			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kab. Purbalingga	11 puskesmas	559.262.000	DAK Non Fisik		11 puskesmas	559.262.000	Dinkes
1.02.02.2.02.36			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kab. Purbalingga	15 Dokumen	5.420.000	DAK Non Fisik	15 kasus	15 Dokumen	5.420.000	Dinkes
1.02.02.2.02.37			Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah									
1.02.02.2.02.38			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab. Purbalingga	23 unit	242.250.000	DAU	96 kasus kegawatdaruratan	23 unit	250.000.000	Dinkes
1.02.02.2.02.39			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Dinkes	250.000 Keluarga	71.940.000			250.000 Keluarga	75.000.000	Dinkes
1.02.02.2.03.			3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase sistem Informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang terintegrasi dalam SIK		100 Persen	102.200.000			100 Persen	110.000.000	
1.02.02.2.03.01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	DINKES	40 Dokumen	41.000.000	DAU		40 Dokumen	45.000.000	Dinkes
1.02.02.2.03.02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	25 Fasyankes	1 Dokumen	61.200.000	DAU		1 Dokumen	65.000.000	Dinkes
1.02.02.2.03.03			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet									
1.02.02.2.04.			4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan rekomendasi izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikeluarkan		100 Persen	16.860.000			100 Persen	18.500.000	
1.02.02.2.04.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C dan D	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kab. Purbalingga	8 unit	5.155.000	DAU		8 unit	6.000.000	Dinkes
1.02.02.2.04.02			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kab. Purbalingga	54 unit	5.665.000	DAU		54 unit	6.000.000	Dinkes
1.02.02.2.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Kab. Purbalingga	54 unit	6.040.000	DAU		54 unit	6.500.000	Dinkes
1.02.02.2.04.04			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan									
1.02.03.			C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar		56,52 persen	129.907.000			66,67 persen	135.000.000	
1.02.03.2.01.			1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan Tenaga Kesehatan yang mendapatkan ijin praktek		80 persen	25.000.000			81 persen	25.000.000	
1.02.03.2.01.01			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	15.000.000	DAU	100 nakes	100 dokumen	15.000.000	Dinkes
1.02.03.2.01.02			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kab. Purbalingga	150 dokumen	10.000.000	DAU	100 nakes	100 dokumen	10.000.000	Dinkes
1.02.03.2.02.			2. Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase ASN yang terfasilitasi Uji Kompetensinya		100%				100%		

1.02.03.2.02.01			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									Dinkes
1.02.03.2.02.02			Pelatihan dan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan	Terselenggaranya uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional	Kab. Purbalingga	200 JFT			Keg utk pelaksanaan ukom dan honor tim penguji	200 JFT		Dinkes
1.02.03.2.02.03			Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan									
1.02.03.2.03.			3. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Cakupan RSUD dan Puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar (%)		100 persen	69.000.000			100 persen	70.000.000	
1.02.03.2.03.02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kab. Purbalingga	50 orang	49.000.000	DAU	50 nakes	50 orang	50.000.000	Dinkes
1.02.03.2.03.02			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kab. Purbalingga	200 dokumen	20.000.000	DAU	200 dokumen PAK	100 dokumen	20.000.000	Dinkes
1.02.03.2.04.			4. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki sertifikasi tenaga kesehatan		90 Persen	35.907.000			92 Persen	40.000.000	
1.02.03.2.04.01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya manusia	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kab. Purbalingga	5 orang	35.907.000	DAU	Penyusunan Profil SDM Kesehatan dan Pelatihan yg diselenggarakan dlm rangka meningkatkan kompetensi SDM kesehatan (2 dokumen), dibutuhkan dana tambahan	5 orang	40.000.000	Dinkes
1.02.03.2.05.			5. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Tingkat Daerah Kabupaten/Kota									
1.02.03.2.05.01			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan									
1.02.03.2.05.02			Pengelolaan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan									
1.02.04.			D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar		49,43 persen	267.502.000			54,55 persen	275.000.000	
				Persentase PIRT bersertifikat yang dilakukan pembinaan dan pengawasan		34 persen				36 persen		
1.02.04.2.01.			1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	38.960.000			100 Persen	40.000.000	
1.02.04.2.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1.02.04.2.01.02			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kab. Purbalingga	78 sarana	38.960.000	DAU, DAK NF	65 apotek, 13 sarana lain	78 sarana	40.000.000	Dinkes
1.02.04.2.01.03			Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)									
1.02.04.2.02.			2. Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas I tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
1.02.04.2.02.01			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
1.02.04.2.02.02			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga									
1.02.04.2.03.			3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase rekomendasi pemberian izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang dikeluarkan		100 Persen	121.390.000			100 Persen	125.000.000	
1.02.04.2.03.01			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab. Purbalingga	128 dokumen	121.390.000	DAU, DAK NF	128 sertifikat	128 dokumen	125.000.000	Dinkes
1.02.04.2.04.			4. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase TPM yang terfasilitasi penerbitan sertifikat laik higienenya		100%				100%		

1.02.04.2.04.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kab. Purbalingga	110 dokumen		DAU, DAK NF	50 TPM60 Depot air minum	110 dokumen		Dinkes
1.02.04.2.05.			5. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
1.02.04.2.05.01			Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan									
1.02.04.2.06.			6. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil pemeriksaan post market yang ditindaklanjuti		100%	107.152.000			100%	110.000.000	
1.02.04.2.06.01			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kab. Purbalingga	30 unit	107.152.000	DAU, DAK NF	45 sampel	45 unit	110.000.000	Dinkes
1.02.04.2.06.02			Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga									
1.02.05.			E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa/keurahan Sehat mandiri		27,20%	629.489.000			28,03%	640.000.000	
1.02.05.2.01.			1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase organisasi masyarakat yang mendapatkan penyuluhan melalui media promosi		100%	380.114.000			100%	385.000.000	
1.02.05.2.01.01			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kab. Purbalingga	152 Dokumen	380.114.000	DAU, DAK NF	Workshop Pemberdayaan SBH, Kader Remaja, Kaderkes, guru UKS, Santri, Pekerja Pabrik; Workshop Germas (152 penyuluhan)	152 Dokumen	385.000.000	Dinkes
1.02.05.2.02.			2. Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan RT yang ber PHBS		88%	166.975.000			88%	170.000.000	
1.02.05.2.02.01			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kab. Purbalingga	3 Dokumen	166.975.000	DAU, DAK NF	Kampanye Germas, PHBS; Lomba kantin Sehat	3 Dokumen	170.000.000	Dinkes
1.02.05.2.03.			3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan desa sehat mandiri		27,20%	82.400.000			28,03%	85.000.000	
1.02.05.2.03.01			Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kab. Purbalingga	65 Dokumen	82.400.000	DAU, DAK NF	Jogo Tonggo; Lomba DSM; Monev UKBM, Posyandu (65 desa)	65 Dokumen	85.000.000	Dinkes
							165.316.820.000				169.351.765.000	

BAB V

PENUTUP

Demikian Renja OPD Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga disusun sebagai sarana untuk mengarahkan segenap jajaran Kesehatan untuk mencapai Purbalingga yang sehat mandiri. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2023.

A. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan.

B. Kaidah-kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya
2. Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023.

C. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan

5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Keberhasilan pembangunan tersebut lebih ditentukan oleh semangat, sikap mental, disiplin dan kejujuran seluruh jajaran kesehatan serta peran serta aktif lintas sektor dan peran serta masyarakat pada umumnya.